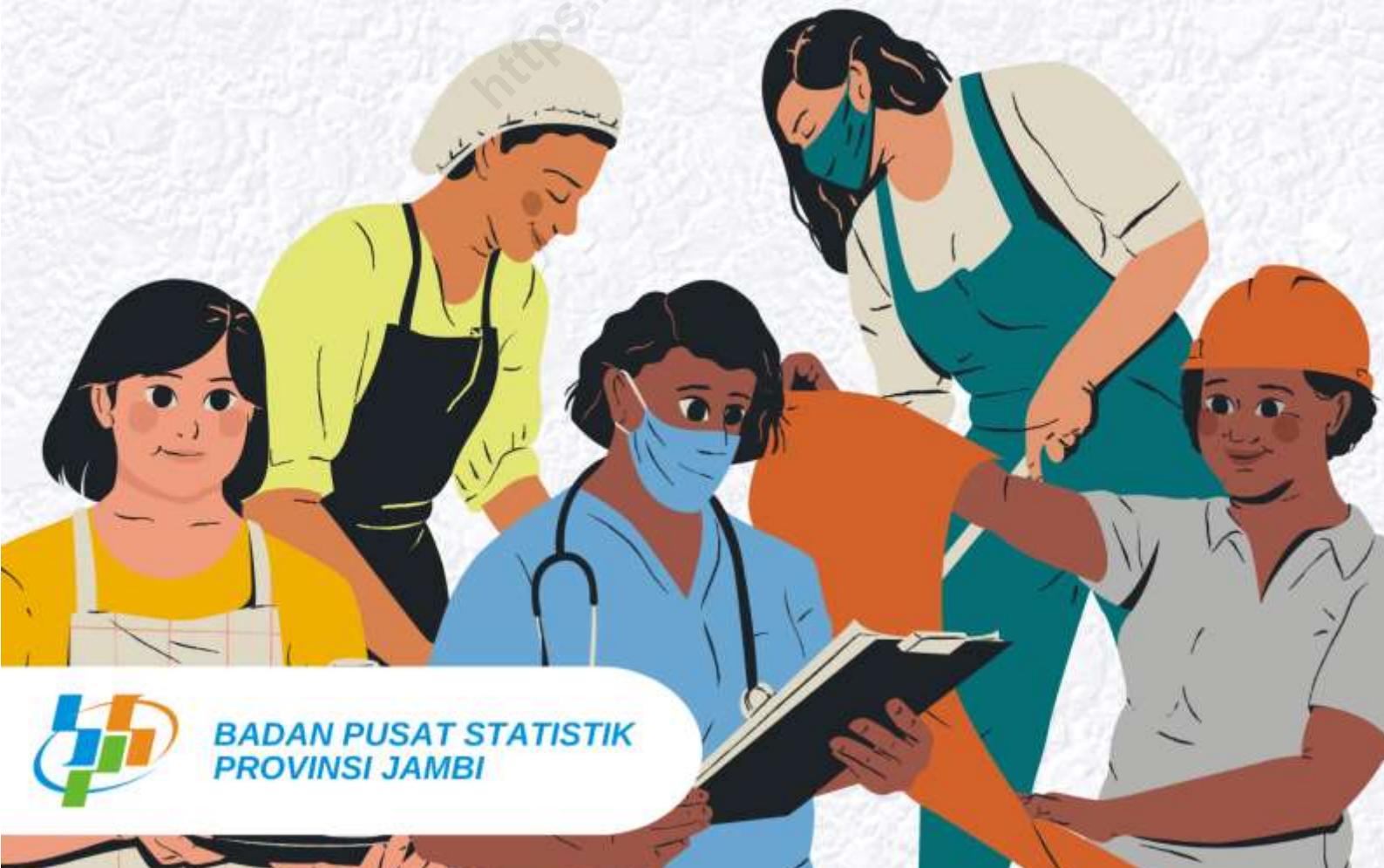


INDIKATOR
**PASAR
TENAGA
KERJA**
PROVINSI JAMBI

AGUSTUS 2024

VOLUME 4, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

INDIKATOR
**PASAR
TENAGA
KERJA**
PROVINSI JAMBI

AGUSTUS 2024

VOLUME 4, 2025

<https://jambi.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI JAMBI AGUSTUS 2024

Volume 4, 2025

Katalog : 2302004.15
Nomor Publikasi : 15000.25015
Ukuran Buku : 21,0 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xviii+89 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Sumber Ilustrasi:

www.canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

TIM PENYUSUN

Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Jambi Agustus 2024

Volume 4, 2025

Pengarah

Agus Sudibyo, M.Stat.

Penanggung Jawab

Sisilia Nurteta, S.S.T., M.Si.

Penyunting

Ni Kadek Suardani, S.S.T., M.S.E.

Penulis Naskah

Isdhani Nurrahmah, S.Tr.Stat.

Pengolah Data

Rita Rifati, S.ST., M.Si.

Penata Letak

Isdhani Nurrahmah, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilaksanakan oleh BPS secara semesteran (Februari dan Agustus) sejak tahun 2015. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan hasilnya diharapkan dapat memotret dinamika ketenagakerjaan secara berkesinambungan. Sakernas yang dilaksanakan pada bulan Februari dirancang untuk menghasilkan estimasi indikator ketenagakerjaan pada tingkat provinsi, sedangkan Sakernas Agustus mampu menyajikan estimasi indikator hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Jambi Agustus 2024 menyajikan perkembangan indikator pasar tenaga kerja yang mengacu pada (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*) edisi 9 tahun 2015 yang direkomendasikan oleh ILO (*International Labour Organization*). Periode Sakernas yang disajikan dalam publikasi ini adalah Agustus 2023, Februari 2024, dan Agustus 2024.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menjelaskan kondisi pasar tenaga kerja di Provinsi Jambi. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk menyempurnakan publikasi edisi berikutnya. Semoga publikasi ini dapat menjadi rujukan untuk memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi.

Jambi, Mei 2025
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jambi



Agus Sudibyo, M.Stat.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KBJI	Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan.....	4
Sakernas dan KILM.....	5
Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan.....	8
Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM.....	10
BAB 2 PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA	13
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	15
KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (<i>Employment to Population Ratio-EPR</i>).....	20
KILM 3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.....	24
KILM 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	26
KILM 5. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama	29
KILM 6. Pekerja Paruh Waktu	31
KILM 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja.....	34
KILM 8. Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal	37
BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN	41
KILM 9. Pengangguran	43
KILM 10. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda	47
KILM 12. Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>).....	51

BAB 4 INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA	55
KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan	57
BAB 5 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF	59
KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf	61
BAB 6 INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA.....	65
KILM 15. Upah dan Biaya Kompensasi.....	67
CATATAN TEKNIS.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	89

<https://jambi.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024.....	24
Tabel 2	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jambi (17 Kategori), 2023 dan 2024.....	26
Tabel 3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024.....	29
Tabel 4	Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024.....	43
Tabel 5	Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Umur Dewasa di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024.....	49
Tabel 6	Penduduk Bekerja yang Termasuk Setengah Pengangguran di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024.....	51
Tabel 7	Indikator Setengah Pengangguran di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024...	52
Tabel 8	Tingkat Ketidaktifan di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024.....	57
Tabel 9	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024.....	62
Tabel 10	Rata-Rata Upah/Gaji Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai di Provinsi Jambi (juta rupiah), 2023 dan 2024.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024.....	15
Gambar 2	TPAK Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024 ..	15
Gambar 3	TPAK Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jambi (persen), Februari 2024 dan Agustus 2024	17
Gambar 4	TPAK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), Agustus 2024	18
Gambar 5	<i>Employment to Population Ratio</i> (EPR) di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024..	20
Gambar 6	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024	21
Gambar 7	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024	21
Gambar 8	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jambi, Februari 2024 dan Agustus 2024.....	22
Gambar 9	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Agustus 2024	23
Gambar 10	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jambi, Agustus 2024.....	27
Gambar 11	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, Agustus 2024.....	30
Gambar 12	Tingkat Pekerja Paruh Waktu di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024..	31
Gambar 13	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024	32
Gambar 14	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), Agustus 2024.....	33
Gambar 15	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024	34
Gambar 16	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, Agustus 2024	35
Gambar 17	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Jambi, Agustus 2024.....	36
Gambar 18	Persentase Penduduk Bekerja pada Kegiatan Formal/Informal di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024	37

Gambar 19	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024.....	38
Gambar 20	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Agustus 2024.....	39
Gambar 21	TPT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), Agustus 2024..	44
Gambar 22	TPT Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024.....	45
Gambar 23	Distribusi Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), Agustus 2024	46
Gambar 24	TPT Penduduk Umur Muda di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024.....	47
Gambar 25	TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024.....	47
Gambar 26	<i>Share</i> Penganggur Umur Muda di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024.....	49
Gambar 27	Distribusi Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024.....	53
Gambar 28	Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, Agustus 2024.....	58
Gambar 29	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024.....	63
Gambar 30	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024	63
Gambar 31	Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (juta rupiah), Agustus 2024 ..	68

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan bahwa penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Provinsi Jambi mencapai 1.919.342 orang. Jumlah tersebut meningkat 63.225 orang dibandingkan Februari 2024 dan meningkat 31.502 orang dibandingkan Agustus 2023.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2024 mencapai 68,87 persen. Dengan kata lain, dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Jambi, sekitar 69 penduduk di antaranya termasuk angkatan kerja. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,78 persen poin dibandingkan Februari 2024 dan kenaikan sebesar 0,12 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Pada Agustus 2024, *Employment to Population Ratio* (EPR) Provinsi Jambi mencapai 65,78 persen atau dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas di Provinsi Jambi, terdapat sekitar 66 orang yang bekerja. EPR mengalami penurunan pada periode Februari 2024, namun kembali meningkat pada Agustus 2024.

Distribusi penduduk bekerja jika dirinci berdasarkan status pekerjaan utama tidak jauh berbeda baik pada periode Agustus 2023, Februari 2024, maupun Agustus 2024. Penduduk bekerja didominasi oleh mereka yang berstatus berusaha (42,49 persen). Persentase terbesar berikutnya yaitu buruh/karyawan/pegawai (36,13 persen), pekerja keluarga (13,23 persen) dan urutan terakhir adalah pekerja bebas (8,16 persen).

Struktur lapangan pekerjaan utama di Provinsi Jambi menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda baik pada Agustus 2023, Februari 2024, maupun Agustus 2024 yang masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kondisi pada Agustus 2024 menunjukkan persentase penduduk bekerja pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 43,92 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah kategori perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 16,64 persen.

Kondisi jenis pekerjaan utama pada Agustus 2024 masih mempunyai pola yang sama baik pada Februari 2024 maupun Agustus 2023. Sebagai gambaran, pada Agustus 2024 penduduk bekerja didominasi oleh tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan dengan persentase sebesar 41,85 persen. Posisi berikutnya pada jenis pekerjaan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar yang mencapai 20,48 persen, dan posisi ketiga terbesar adalah tenaga usaha penjualan (18,53 persen).

Tingkat pekerja paruh waktu berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024 mencapai 25,55 persen. Dapat diartikan dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 26 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak memiliki keinginan untuk menambah pekerjaan (jam kerja). Tingkat pekerja paruh waktu pada Agustus 2024 mengalami penurunan 5,85 persen poin dibandingkan Agustus 2023 dan menurun 8,36 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Lebih dari sepertiga penduduk Provinsi Jambi bekerja normal yaitu 35–48 jam per minggu (39,59 persen), dan sepertiga lainnya bekerja dengan jam kerja 1–34 jam seminggu (33,97 persen). Sementara itu, sebanyak 24,67 persen penduduk Provinsi Jambi berkerja lebih dari 48 jam seminggu.

Hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan bahwa sebesar 58,35 persen penduduk bekerja di Provinsi Jambi bekerja pada kegiatan informal. Persentase ini mengalami penurunan baik jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2023 dan Februari 2024.

Sementara itu, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) mencapai 4,48 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Provinsi Jambi, terdapat sekitar 5 orang penganggur. Persentase ini menurun 0,05 persen poin dari Agustus 2023 dan naik 0,03 persen poin dari Februari 2024. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, TPT tertinggi terdapat pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebesar 6,80 persen. Hal ini mengindikasikan banyak lulusan SMA yang belum terserap di pasar tenaga kerja.

Di samping itu, TPT penduduk kelompok umur muda mencapai 14,66 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 15 orang yang menganggur. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,55 persen poin dibandingkan Agustus 2023 dan penurunan sebesar 1,82 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Jumlah penduduk yang termasuk setengah pengangguran di Provinsi Jambi pada Agustus 2024 mencapai 154.465 orang, yang terdiri dari 100.937 penduduk laki-laki dan 53.528 penduduk perempuan. Jika dibandingkan Agustus 2023, jumlahnya mengalami penurunan sebanyak 12.481 orang dan jika dibandingkan dengan Februari 2024 sebanyak 37.387 orang.

Hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan tingkat ketidakaktifan di Provinsi Jambi mencapai 31,13 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Provinsi Jambi, yang

tidak aktif dalam pasar tenaga kerja (bukan angkatan kerja) sekitar 32 orang. Tingkat ketidakaktifan cenderung stagnan pada kisaran 31–33 persen selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024.

Sakernas Agustus 2024 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada kontribusi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan jika dibandingkan dengan Agustus 2023 dan Februari 2024. Pada Agustus 2024, sebagian besar angkatan kerja masih didominasi oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan dasar (52,47 persen). Sementara itu, angkatan kerja yang berpendidikan menengah mencapai 34,43 persen dan pendidikan tingkat tinggi sebesar 12,86 persen.

Sementara itu, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2024 mencapai 2,83 juta rupiah. Rata-rata upah/gaji ini meningkat dibandingkan Agustus 2023 dan Februari 2024.

<https://jambi.bps.go.id>

1

PENDAHULUAN

Pada publikasi ini, KILM yang digunakan sebagai rujukan adalah **edisi ke-9** yang diterbitkan ILO pada tahun 2015



BAB 1

PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Provinsi Jambi. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertujuan untuk memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Provinsi Jambi.

International Labour Organization (ILO) telah meluncurkan Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*) pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Untuk KILM Provinsi Jambi tahun 2024 ini, KILM yang digunakan sebagai rujukan adalah edisi ke-9 yang diterbitkan ILO pada tahun 2015. KILM edisi kesembilan terdiri dari tujuh belas indikator, yaitu:

1. KILM-1: Tingkat partisipasi angkatan kerja
2. KILM-2: Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk
3. KILM-3: Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
4. KILM-4: Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
5. KILM-5: Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama
6. KILM-6: Pekerja Paruh Waktu
7. KILM-7: Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja
8. KILM-8: Penduduk yang Bekerja di Kegiatan Informal
9. KILM-9: Pengangguran
10. KILM-10: Pengangguran pada Kelompok Umur Muda
11. KILM-11: Pengangguran Jangka Panjang
12. KILM-12: Setengah Pengangguran
13. KILM-13: Tingkat ketidakaktifan
14. KILM-14: Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf
15. KILM-15: Upah dan Biaya Tenaga Kerja
16. KILM-16: Produktivitas Tenaga Kerja

Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Di antara survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Pada November 2014, Sakernas tidak dilaksanakan karena adanya berbagai alasan. Sejak tahun 2015, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah sampel Sakernas se-Indonesia pada Agustus 2015 sekitar 200.000 rumah tangga,

sedangkan pada Agustus 2016 sekitar 50.000 rumah tangga. Pada Sakernas Agustus 2018, jumlah sampel kembali sebanyak 200.000 rumah tangga. Mulai tahun 2019, Sakernas mendapatkan penambahan sampel pada Februari menjadi 75.000 rumah tangga dan sampel Agustus berjumlah 300.000 rumah tangga. Pada Sakernas Agustus 2024, cakupan pendataan seluruh provinsi sebanyak 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan jumlah sampel sebanyak 30.788 Blok Sensus (BS) atau sekitar 307.880 rumah tangga.

Pada Sakernas Agustus 2024, pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan moda *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu dengan aplikasi FASIH. Data yang dikumpulkan pada Sakernas Agustus 2024 untuk setiap rumah tangga terpilih meliputi keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga (nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat lahir, bulan dan tahun lahir, umur serta nomor urut ibu kandung). Pada anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas, dikumpulkan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), status perkawinan, partisipasi sekolah, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal 5 tahun yang lalu, disabilitas, variabel Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), kegiatan bekerja seminggu terakhir, pekerjaan utama, pekerjaan tambahan utama, kegiatan mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru, pengalaman kerja baik di dalam maupun di luar negeri, kegiatan lainnya, serta Program Kartu Prakerja untuk yang berumur 18 tahun ke atas.

Sakernas dan KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Akan tetapi, yang perlu menjadi catatan adalah pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain seperti SP, SUPAS, dan Susenas, sehingga perlu memperhatikan beberapa hal karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pengguna data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1. Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2. Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3. Faktor Pengali/Penimbang

Data ketenagakerjaan Agustus 2020 – Agustus 2024 menggunakan penimbang langsung dari hasil updating dengan memperhitungkan strata lapangan pekerjaan dan menggunakan hasil Proyeksi Penduduk 2020–2050 sebagai kalibrasi akhir.

4. Kualitas Petugas Lapangan

Petugas lapangan Sakernas Agustus 2024 terdiri dari pengawas dan pencacah. Pengawas merupakan pegawai organik BPS provinsi atau BPS kabupaten/kota (diutamakan lulusan minimal D-III dan berpengalaman dalam pengumpulan data Sakernas). Pencacah adalah pegawai organik BPS kabupaten/kota maupun nonorganik (mitra statistik) BPS yang ditunjuk dan diutamakan berpendidikan minimal SLTA dan berpengalaman dalam pengumpulan data Sakernas.

Secara umum, seorang pencacah lapangan (PCL) akan bertugas melakukan pencacahan pada 2 sampai 3 Blok Sensus (sebagian besar PCL akan bertugas pada 3 blok sensus). Seorang pengawas/pemeriksa lapangan (PML) bertugas mengawasi 2 sampai 3 PCL.

5. Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

Sejak Agustus 2020, dilakukan penyempurnaan kuesioner yaitu menyesuaikan kondisi "*new normal*" pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Perubahan utama kuesioner tersebut diantaranya adalah penggunaan konsep ketenagakerjaan menurut konsep ICLS-13, penambahan pertanyaan terkait dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan berdasarkan rekomendasi ILO, penyederhanaan kuesioner serta pengelompokan pertanyaan menurut masing-masing topik.

Pada Sakernas Agustus 2023, terdapat beberapa perubahan pada kuesioner, perubahan yang cukup signifikan adalah penghapusan pertanyaan terkait dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan, dengan pertimbangan telah dicabutnya status darurat COVID-19 oleh *World Health Organization* (WHO) pada 5 Mei 2023. Dalam rangka penyempurnaan pendataan Sakernas Agustus 2024, terdapat perubahan konten maupun alur pertanyaan pada E-Form SAK.AGS24-AK, perubahan tersebut diantaranya adalah:

- Penambahan pilihan jawaban pada pertanyaan program magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- Update periode referensi;
- Penambahan pertanyaan terkait Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk responden berumur 5 tahun ke atas (kepemilikan/penguasaan telepon seluler, penggunaan teknologi digital dan pemanfaatan internet);
- Penyempurnaan dan penambahan pilihan jawaban terkait TIK (teknologi digital dan pemanfaatan internet) untuk pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan utama;
- Penyempurnaan pilihan jawaban untuk pertanyaan perjalanan pergi dan pulang ke tempat kerja;

- Perubahan format pertanyaan moda transportasi yang biasa digunakan berangkat ke tempat kerja;
- Penyempurnaan pilihan jawaban untuk moda transportasi utama yang digunakan berangkat ke tempat kerja;
- Penambahan pilihan jawaban untuk pertanyaan tahun diterima Prakerja; dan
- Penyempurnaan alur pertanyaan

6. Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan SUPAS berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

1. Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
2. Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini.

Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*-OECD) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1. Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*)

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 9, 10, dan 12), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan dari indikator bukan angkatan kerja (KILM 13).

Untuk mengetahui kualitas pekerjaan sehingga disebut "layak" dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama, lapangan pekerjaan utama, dan jenis pekerjaan utama (KILM 3, KILM 4, dan KILM 5); jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* pada indikator penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja (KILM 7); penduduk yang bekerja di kegiatan informal (KILM 8); dan setengah pengangguran (KILM 12).

2. Pemantauan Pencapaian Tujuan Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs adalah tujuan yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan secara global, tujuan ini merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Sakernas sebagai salah satu sumber data penyusun indikator SDGs diharapkan dapat memenuhi informasi yang diperlukan.

Indikator SDGs yang dapat dihasilkan dari Sakernas diantaranya:

- Proporsi wanita yang memegang jabatan manajerial.
- Proporsi pekerjaan informal di sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin.
- Proporsi penduduk muda (15–24 tahun) yang tidak sedang mengikuti pendidikan, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET).

- Persentase jumlah anak usia 5–17 tahun yang terlibat dalam pekerja anak, menurut kelompok jenis kelamin dan umur.
 - Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja dan tingkat pertumbuhan pekerja, menurut jenis kelamin.
 - Pekerja sektor manufaktur sebagai proporsi dari total pekerja.
3. Memantau Kesenjangan Gender di Pasar Tenaga Kerja

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4. Mengkaji Tenaga Kerja di Era Globalisasi

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM

Semakin hari semakin banyak negara yang menghitung statistik ketenagakerjaan khususnya angka pengangguran. Akan tetapi perlu kehati-hatian dalam menggunakan angka pengangguran tersebut, apalagi untuk menganalisis kondisi pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan angka pengangguran adalah relatif mudah dalam hal pengumpulan data dan untuk perbandingan antardaerah. Akan tetapi adalah

kekeliruan, jika hanya melihat angka pengangguran saja tanpa melihat unsur-unsur pasar tenaga kerja yang lain. Penting untuk disadari bahwa pengangguran “hanya” salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan.

Langkah pertama dalam menganalisis kondisi pasar tenaga kerja adalah membagi penduduk dalam dua kategori, yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Batas penduduk usia kerja di Indonesia adalah 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terbagi lagi menjadi dua kategori yaitu yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja-KILM 1) dan yang tidak aktif dalam perekonomian (bukan angkatan kerja-KILM 13). Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja (KILM 2) dan menganggur (KILM 9). Kualitas angkatan kerja bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang dicapai, semakin tinggi tingkat pendidikan maka kualitas relatif semakin baik (KILM 14).

Apabila di suatu negara, banyak penduduk yang masuk kategori pengangguran atau bukan angkatan kerja maupun keduanya, menunjukkan adanya masalah tenaga kerja yang kurang termanfaatkan (*underutilized*). Dalam menghadapi situasi tersebut pemerintah seharusnya berusaha untuk menganalisis apa alasan penduduk tidak aktif di pasar tenaga kerja, sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat.

Apabila diketahui mayoritas bukan angkatan kerja adalah perempuan, dan alasannya karena perempuan memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga, pemerintah mungkin dapat membuat kebijakan yang dapat mendorong perempuan masuk ke pasar tenaga kerja. Misalnya dengan membangun pusat-pusat penitipan anak, memberikan jam kerja yang lebih fleksibel terhadap perempuan, dan lain-lain.

Masalah yang lebih sulit dipecahkan oleh pemerintah adalah bagaimana cara mengembalikan orang yang “putus asa” (*discourage worker*) masuk kembali ke pasar tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan karena orang yang “putus asa” merasa tidak ada pekerjaan yang sesuai, atau kualifikasi mereka kurang, atau bahkan mereka tidak tahu kemana harus mencari kerja. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah bisa membuat pelatihan-pelatihan kerja sesuai minat dan kemampuan mereka, atau membuat lembaga yang dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi mereka.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin, daerah tempat tinggal (perkotaan-perdesaan), tingkat pendidikan (KILM 9), dan kelompok umur muda (KILM 10), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi dan pengalaman kerja (bila tersedia). Karakteristik tersebut juga penting untuk dianalisis, sehingga dapat dicari akar masalahnya dan bisa diberikan solusi kebijakan yang tepat. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan kemiskinan yang substansial di suatu negara, sementara tingkat pengangguran yang tinggi bisa terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan tingkat kemiskinan yang rendah.

Di negara-negara berkembang umumnya tidak tersedia jaminan perlindungan sosial (misalnya: asuransi pengangguran dan tunjangan kesejahteraan). Akibatnya mereka yang relatif “kaya” yang mampu menganggur. Pengangguran adalah barang mewah, hanya mereka yang mempunyai tabungan atau pendapatan di luar pekerjaan (*non-labour income*) yang bisa menganggur. Sementara mereka yang miskin, tidak bisa menganggur, mereka harus bekerja apa saja untuk dapat hidup (*too poor to be unemployed*).

Sehingga penting untuk menelaah dari total penduduk bekerja di Provinsi Jambi, berapa banyak yang mempunyai pekerjaan yang layak. Pekerjaan layak adalah pekerjaan yang dilakukan atas kemauan atau pilihan sendiri, memberikan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup secara layak dan berharkat, serta menjamin keselamatan fisik maupun psikologis. Kelayakan pekerjaan dapat dilihat dari status pekerjaan seseorang (KILM 3), apakah dia sebagai buruh/karyawan yang cenderung mempunyai penghasilan tetap atau hanya sebagai pekerja bebas pertanian yang penghasilannya tidak menentu. Lapangan pekerjaan (KILM 4), jenis pekerjaan (KILM 5), pekerja paruh waktu (KILM 6), jumlah jam kerja (KILM 7), kegiatan informal (KILM 8), dan setengah pengangguran (KILM 12) dapat dijadikan indikator untuk melihat seberapa layak pekerjaan yang tersedia di Provinsi Jambi. Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut sejahtera atau tidak dapat dilihat dari upah/pendapatannya (KILM 15).

2

PARTISIPASI & INDIKATOR TENAGA KERJA

TPAK lansia mencapai **56,80 persen**. Dengan kata lain, **enam dari sepuluh** lansia di Provinsi Jambi masih **aktif** di dalam pasar kerja.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

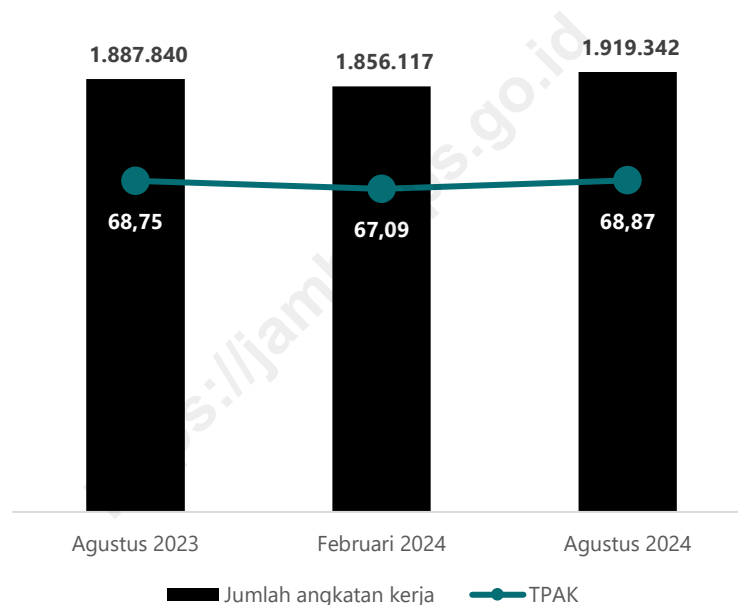


BAB 2

PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada Agustus 2024, penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Provinsi Jambi mencapai 1.919.342 orang. Jumlah tersebut meningkat 63.225 orang dibandingkan Februari 2024 dan meningkat 31.502 orang dibandingkan Agustus 2023 (Gambar 1).

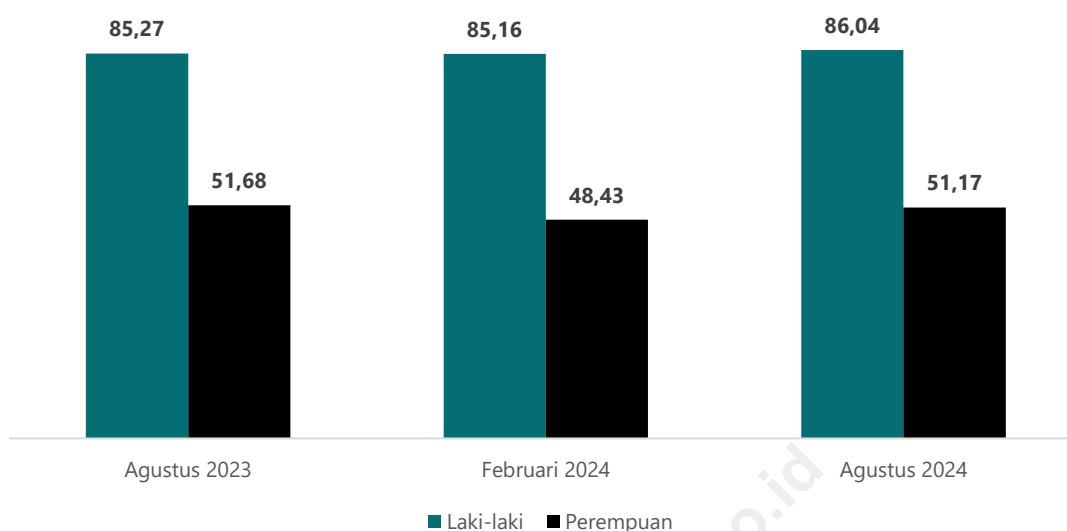


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 1 Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator utama dari potensi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Peningkatan angkatan kerja di Provinsi Jambi juga diiringi dengan kenaikan angka TPAK yang mana pada Agustus 2024 sebesar 68,87 persen (Gambar 1). Dengan kata lain, dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas di

Provinsi Jambi, 68–69 penduduk di antaranya termasuk angkatan kerja. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,78 persen poin dibandingkan Februari 2024 dan kenaikan sebesar 0,12 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.



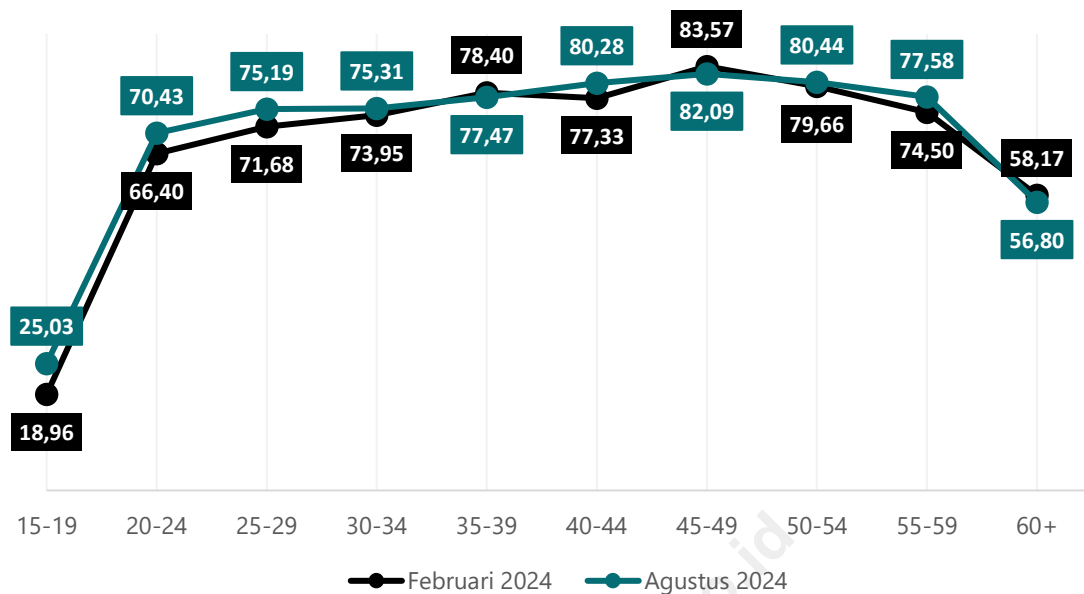
Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 2 TPAK Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024

Secara umum, dari waktu ke waktu, TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Kondisi ini selalu sama baik pada Agustus 2023, Februari 2024, maupun Agustus 2024 yang menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih tinggi hingga lebih dari 1,5 kali TPAK perempuan. Sebagaimana pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 86,04 persen dan mencapai 1,68 kali TPAK perempuan yang hanya sebesar 51,17 persen (Gambar 2). Nilai TPAK Agustus 2024 tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk laki-laki usia kerja, sekitar 86 orang yang termasuk angkatan kerja. Sementara itu, dari 100 penduduk perempuan usia kerja, sekitar 51 orang yang termasuk angkatan kerja.

Rendahnya TPAK perempuan ini dapat disebabkan karena perempuan lebih cenderung untuk masuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Perempuan umumnya melakukan pekerjaan mengurus rumah tangga serta merawat anak dan orang tua yang terdapat di dalam rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga yang

seringkali dilakukan oleh perempuan memengaruhi ketersediaan perempuan tersebut untuk bekerja.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

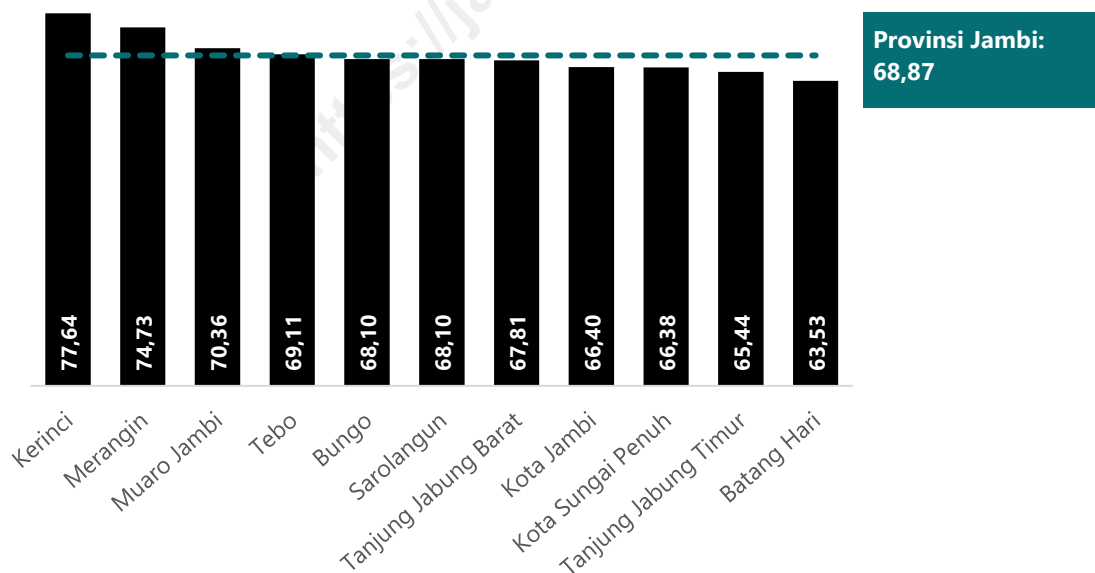
Gambar 3 TPAK Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jambi (persen), 2024

TPAK menurut kelompok umur menunjukkan pola seperti huruf "U" terbalik (Gambar 3). Pada kondisi Agustus 2024, TPAK terendah berada pada kelompok umur 15–19 tahun. Rendahnya tingkat partisipasi kerja pada kelompok umur ini menjadi gambaran bahwa sebagian besar kelompok umur tersebut masih aktif bersekolah dan hanya sebagian kecil yang aktif di pasar tenaga kerja. Pada awalnya, TPAK semakin meningkat seiring dengan peningkatan kelompok umur dan mencapai puncaknya pada kelompok umur 45–49 tahun (mencapai angka 82,09 persen) dan terus menurun pada kelompok umur berikutnya hingga pada usia yang semakin tua. Pola yang semakin menurun ini dapat mengindikasikan gambaran tenaga kerja yang semakin tidak produktif seiring dengan bertambahnya umur.

Pada Agustus 2024, TPAK kelompok umur 15–19 tahun mencapai 25,03 persen dan mengalami peningkatan tajam pada TPAK kelompok umur 20–24 tahun yang mencapai 70,43 persen. Penduduk usia 15–24 atau sering disebut kelompok umur muda memiliki TPAK yang lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi. Pada

saat terjadi kemerosotan ekonomi, penduduk umur muda yang tidak memiliki pengalaman kerja lebih rentan untuk keluar dari angkatan kerja dibandingkan penduduk dewasa dan tua (BPS, 2022).

Di sisi lain, TPAK penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 56,80 persen. Dengan kata lain, satu dari dua lansia di Provinsi Jambi masih aktif di dalam pasar tenaga kerja. Keputusan lansia untuk aktif di dalam pasar tenaga kerja dapat didasari karena lansia merasa masih kuat secara fisik dan mental sehingga tidak keluar dari pasar tenaga kerja, desakan ekonomi, atau aktualisasi diri (Wirakartakusumah dan Anwar, 1994). Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015–2045 (BPS, 2018), diperkirakan di tahun 2045, hampir 1 dari 5 penduduk Provinsi Jambi merupakan lansia. Fenomena penuaan penduduk ini dapat menjadi peluang untuk mendapat bonus demografi kedua jika di masa tuanya lansia dapat berkontribusi terhadap pembangunan, salah satunya dengan aktif di dalam pasar tenaga kerja. Namun, perlu dilihat kembali apakah jenis pekerjaan yang dilakukan sudah layak untuk lansia mengingat kondisi fisik lansia yang semakin menurun.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

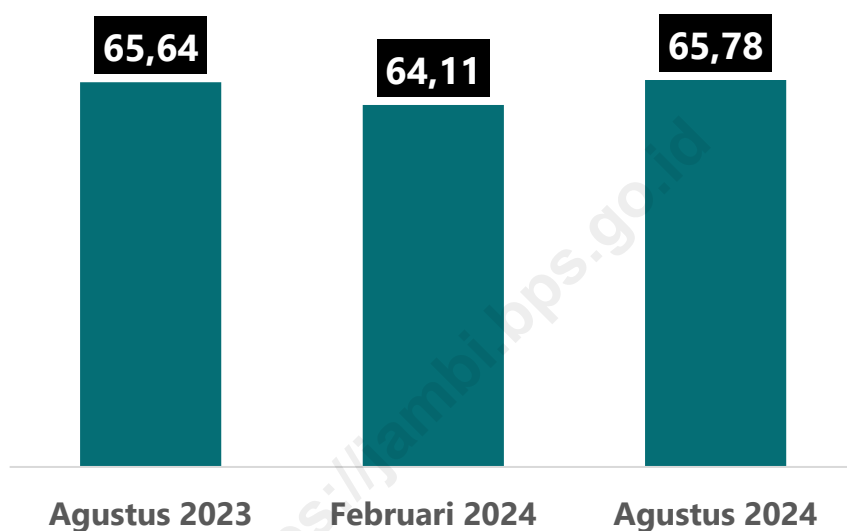
Gambar 4 TPAK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), Agustus 2024

Jika dilihat sebaran menurut kabupaten/kota, TPAK kabupaten/kota di Provinsi Jambi cukup variatif. Pada Agustus 2024, TPAK tertinggi di Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 77,64. Sedangkan, TPAK terendah terdapat di Kabupaten Batang Hari sebesar 63,53 persen. Sementara itu TPAK Provinsi Jambi berada di angka 68,87 persen.

<https://jambi.bps.go.id>

KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*)

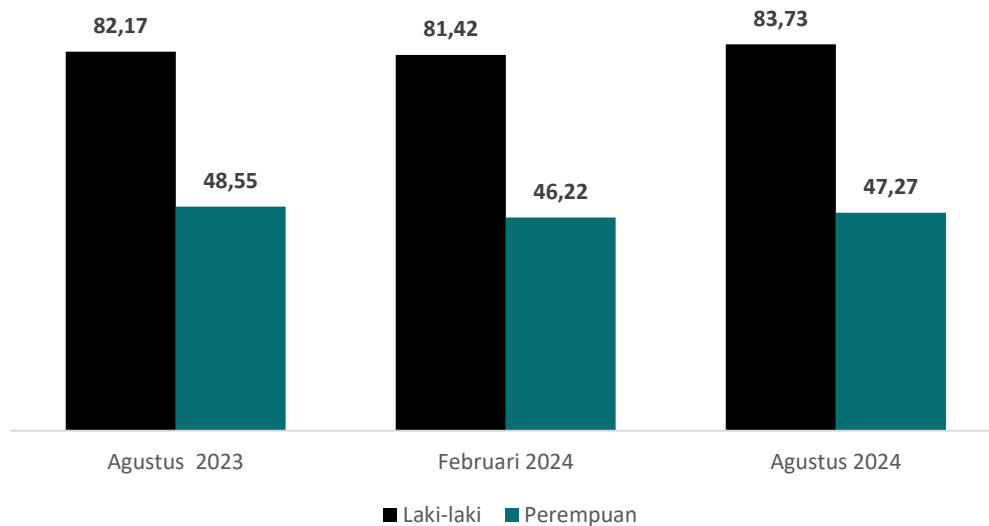
Employment to Population Ratio (EPR) menjadi informasi dalam pengambilan keputusan penciptaan lapangan kerja (BPS, 2022). Semakin tinggi nilai EPR, semakin banyak penyerapan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja. Sedangkan, nilai EPR yang rendah mengindikasikan banyak tenaga kerja masih belum terserap, sehingga perlu penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 5 *Employment to Population Ratio* (EPR) di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

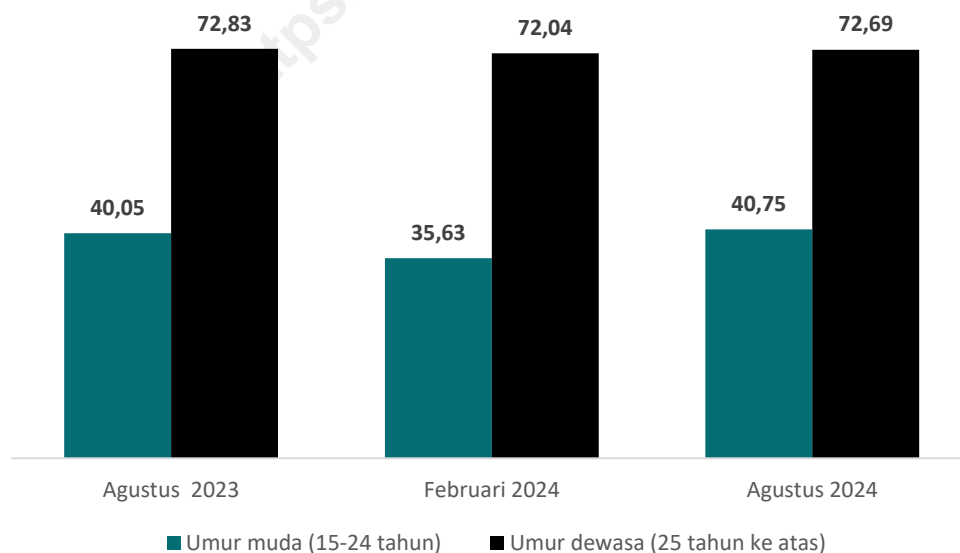
Pada Agustus 2024, EPR Provinsi Jambi mencapai 65,78 persen atau dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas di Provinsi Jambi, terdapat sekitar 66 orang yang bekerja. EPR mengalami penurunan pada periode Februari 2024, namun kembali meningkat pada Agustus 2024. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan penyerapan penduduk bekerja selama setahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 6 *Employment to Population Ratio (EPR)* Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin seperti yang terlihat pada Gambar 6, tampak bahwa EPR laki-laki di Provinsi Jambi jauh lebih tinggi dibandingkan EPR perempuan. Pada Agustus 2024, EPR laki-laki lebih tinggi 1,8 kali lipat dibandingkan EPR perempuan (83,73 persen berbanding 47,27 persen).

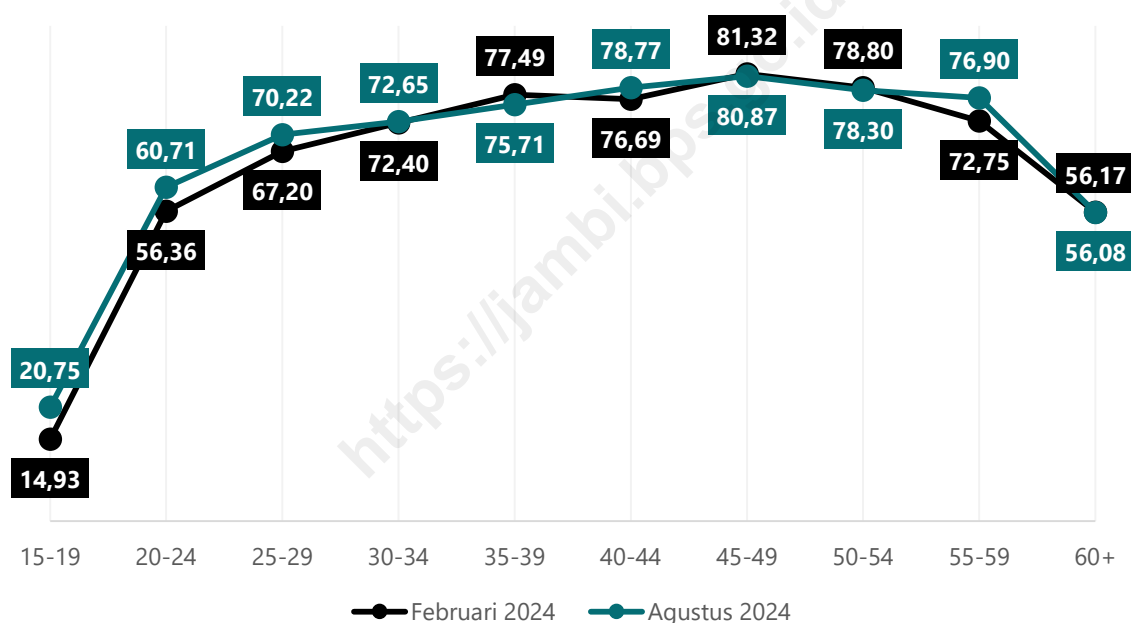


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 7 *Employment to Population Ratio (EPR)* Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Berdasarkan kelompok umur, EPR penduduk umur dewasa (25 tahun ke atas) hampir mencapai dua kali lipat EPR penduduk umur muda (15–24 tahun) baik pada Agustus 2023, Februari 2024, maupun Agustus 2024. Sebagai gambaran, pada Agustus 2024, EPR kelompok umur muda hanya 40,75 persen sedangkan EPR kelompok umur dewasa mencapai 72,69 persen.

Pada Agustus 2024, EPR penduduk umur muda mengalami kenaikan sebesar 5,12 persen poin dibandingkan pada Februari 2024 dan kenaikan sebesar 0,70 persen poin dibandingkan pada Agustus 2023. Sementara itu, EPR penduduk umur dewasa pada Agustus 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024, namun mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

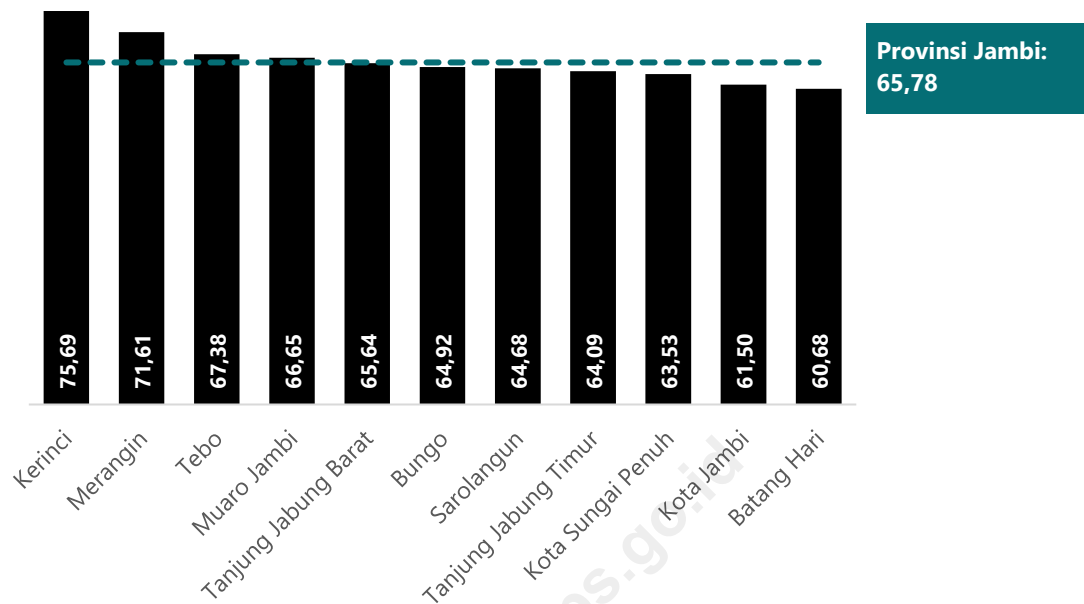


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 8 *Employment to Population Ratio (EPR) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jambi, 2024*

Sebagaimana halnya TPAK pada Gambar 3, pola EPR pada Gambar 8 menurut kelompok umur juga membentuk huruf “U” terbalik. EPR paling rendah terdapat pada kelompok umur 15–19 tahun sebesar 20,75 persen pada Agustus 2024. EPR meningkat drastis pada kelompok umur 20–24 menjadi sebesar 60,71 persen dan perlahan terus meningkat seiring peningkatan kelompok umur. Titik

puncak EPR terdapat pada kelompok umur 45–49 tahun, di mana EPR berada pada angka 80,87 persen. Setelah melalui usia 49 tahun, EPR terus mengalami penurunan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

Gambar 9 *Employment to Population Ratio* (EPR) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Agustus 2024

Jika dilihat menurut kabupaten/kota (Gambar 9), pada periode Agustus 2024, terdapat empat kabupaten/kota dengan EPR di atas EPR Provinsi Jambi (65,78 persen), yaitu Kabupaten Kerinci (75,69 persen), Kabupaten Merangin (71,61 persen), Kabupaten Tebo (67,38 persen), dan Kabupaten Muaro Jambi (66,65 persen). Sedangkan, Kabupaten Batang Hari memiliki EPR terendah, yaitu sebesar 60,68 persen.

KILM 3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan penduduk dapat memberikan informasi mengenai dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan di suatu negara. Status pekerjaan dapat dibedakan menjadi enam kategori: buruh/karyawan/pegawai, berusaha dibantu buruh tetap, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri, pekerja bebas, dan pekerja keluarga.

Tingginya persentase penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, tingginya persentase penduduk yang berusaha sendiri dapat mengindikasikan besarnya proporsi pekerja pada sektor pertanian dan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara umumnya diiringi pergeseran sektor pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa yang ditandai dengan peningkatan jumlah buruh/karyawan/pegawai dan penurunan jumlah pekerja berusaha sendiri serta pekerja keluarga (ILO, 2016).

Tabel 1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Status Pekerjaan Utama	2023	2024	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Buruh/Karyawan/Pegawai	35,27	33,05	36,13
Berusaha	42,97	40,78	42,49
Berusaha dibantu buruh tetap	5,00	6,15	5,52
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	12,72	14,20	13,19
Berusaha sendiri	25,25	20,43	23,78
Pekerja bebas	8,50	9,72	8,16
Pekerja keluarga	13,26	16,40	13,23
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Pada Agustus 2024, status pekerjaan penduduk Provinsi Jambi didominasi kategori berusaha (42,49 persen) dan buruh/karyawan/pegawai (36,13 persen).

Selama setahun terakhir (Agustus 2023 dan 2024), terjadi kenaikan

persentase untuk status buruh/karyawan/pegawai sebesar 0,86 persen poin. Sementara pada status berusaha, pekerja bebas, dan pekerja keluarga mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,48 persen poin, 0,34 persen poin, dan 0,03 persen poin.

Sementara selama periode Februari 2024–Agustus 2024, status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 3,08 persen poin dan status berusaha juga mengalami kenaikan sebesar 1,71 persen poin. Namun, pada status pekerja bebas dan pekerja keluarga mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,56 persen poin dan 3,17 persen poin.

Pembahasan mengenai penduduk yang bekerja dengan status berusaha dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu berusaha dibantu buruh tetap; berusaha dibantu buruh tidak tetap; dan berusaha sendiri. Pada Agustus 2024 persentase berusaha dibantu buruh tetap mencapai 5,52 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 13,19 persen dan berusaha sendiri sebesar 23,78 persen.

KILM 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Struktur lapangan pekerjaan memberikan informasi penting terkait tahap pembangunan suatu negara. Pada umumnya, seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi suatu negara, sektor pekerjaan yang awalnya didominasi sektor pertanian beralih ke sektor industri dan pada akhirnya bergerak ke sektor jasa.

Tabel 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (17 Kategori) di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Lapangan Pekerjaan Utama	2023	2024	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45,19	40,72	43,92
B. Pertambangan dan Penggalian	3,35	4,67	3,77
C. Industri Pengolahan	4,73	8,26	4,87
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,26	0,13	0,17
E. <i>Treatment</i> air, <i>treatment</i> air limbah, dan aktivitas remediasi	0,39	0,07	0,21
F. Konstruksi	4,53	3,44	4,64
G. Perdagangan Besar dan Eceran	15,11	17,07	16,64
H. Transportasi dan Pergudangan	3,52	3,15	2,98
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,67	5,64
J. Informasi dan Komunikasi	0,30	0,80	0,49
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,89	1,07	0,95
L. Real Estat	0,09	0,03	0,17
M,N. Jasa Perusahaan	1,30	0,94	1,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5,39	5,34	5,33
P. Jasa Pendidikan	5,07	4,98	5,04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67	1,46	1,49
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,81	2,21	2,65
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

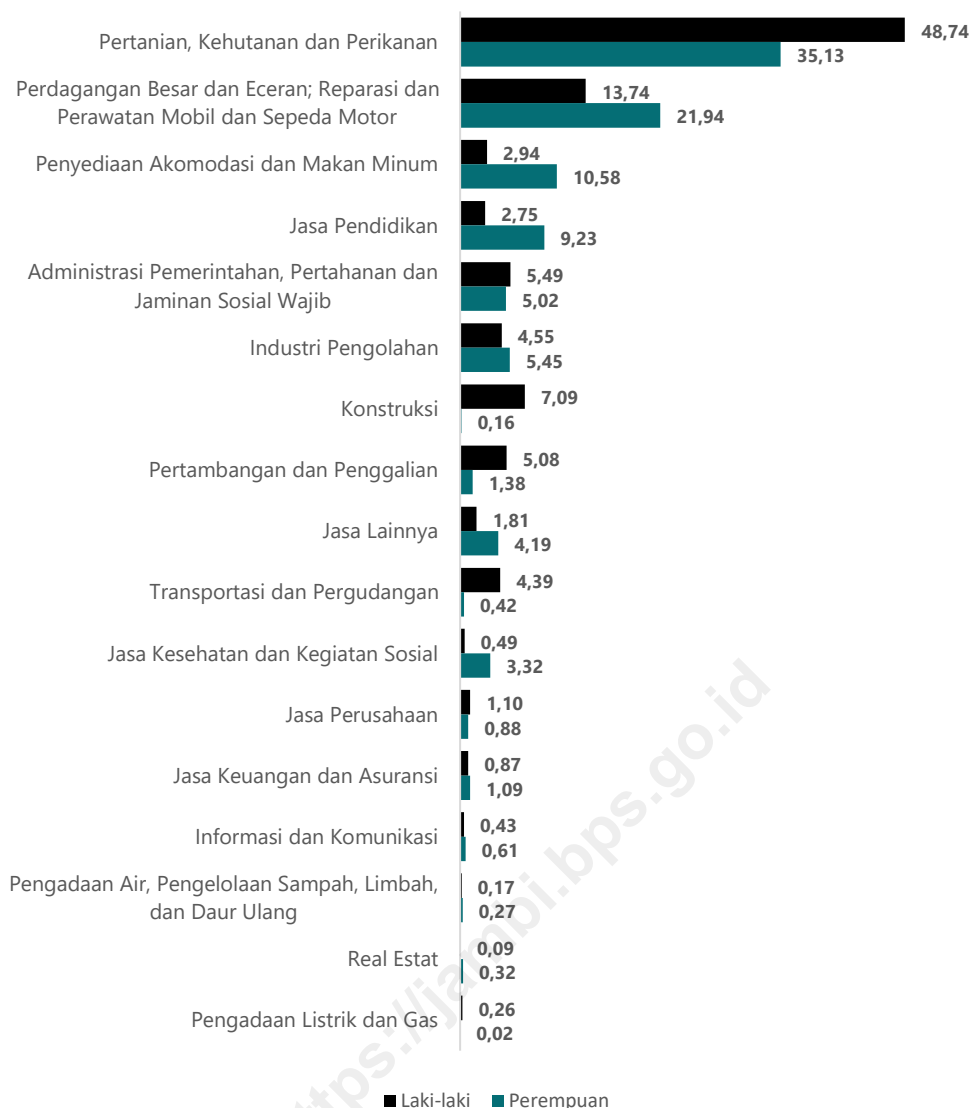
Pada Agustus 2024, lapangan pekerjaan utama penduduk Provinsi Jambi masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (43,92 persen) dan sektor perdagangan besar dan eceran (16,64 persen). Struktur lapangan pekerjaan

utama di Provinsi Jambi menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024.

Sektor yang mengalami peningkatan paling besar selama periode Agustus Agustus 2023 hingga Agustus 2024 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran (1,53 persen poin) dan Pertambangan dan Penggalian (0,42 persen poin). Sedangkan, sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,27 persen poin) dan Transportasi dan Pergudangan (0,54 persen poin).

Pada Agustus 2024, terlihat adanya segregasi lapangan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin penduduk yang bekerja (Gambar 10). Gap terbesar pada proporsi penduduk bekerja laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan terdapat pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan (13,61 persen poin), konstruksi (6,92 persen poin), dan transportasi dan pergudangan (3,97 persen poin). Sedangkan, gap terbesar pada proporsi penduduk bekerja perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki terdapat pada kategori perdagangan (8,20 persen poin), penyediaan akomodasi dan makan minum (7,65 persen poin), dan jasa pendidikan (6,48 persen poin).

Lapangan pekerjaan penduduk perempuan di Provinsi Jambi terkonsentrasi pada sektor jasa, seperti sektor perdagangan (21,94 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (10,58 persen), dan jasa pendidikan (9,23 persen). Perempuan pada umumnya terserap pada sektor jasa berupah rendah dengan waktu bekerja yang fleksibel sehingga memudahkan mereka untuk menyeimbangkan waktu mengurus keluarga dan waktu untuk bekerja (ILO, 2016).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

Gambar 10 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jambi, Agustus 2024

KILM 5. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Statistik jenis pekerjaan dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan tingkat keahlian tenaga kerja. Selain itu, proyeksi jenis pekerjaan seringkali dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keahlian di masa mendatang (ILO, 2016).

Pada Agustus 2024, jenis pekerjaan di Provinsi Jambi didominasi tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan (41,85 persen), tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar (20,48 persen), dan tenaga usaha penjualan (18,53 persen). Struktur jenis pekerjaan selama Agustus 2023 hingga Agustus 2024 cenderung memiliki pola yang sama

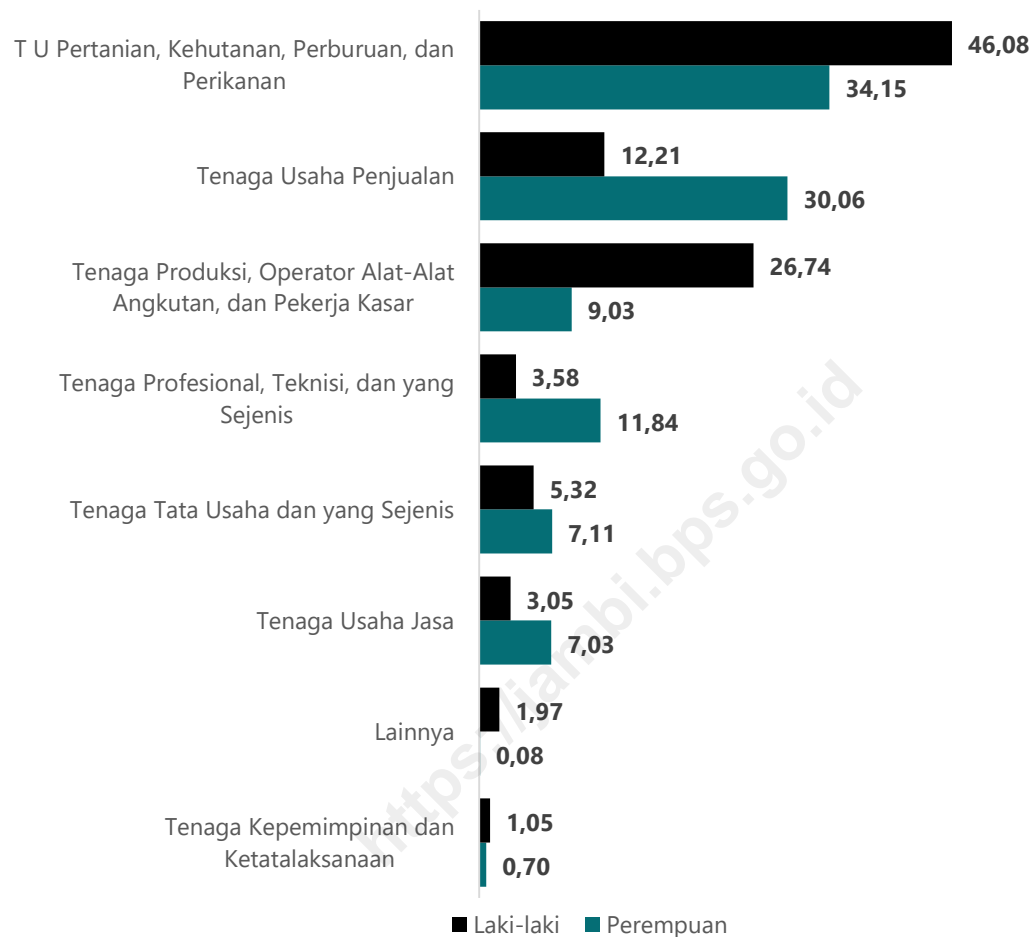
Tabel 3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Jenis Pekerjaan Utama	2023	2024	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis	7,57	6,16	6,50
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	1,01	1,18	0,93
Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	5,68	5,70	5,95
Tenaga Usaha Penjualan	15,30	17,97	18,53
Tenaga Usaha Jasa	4,20	5,15	4,46
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	43,03	37,17	41,85
Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar	21,64	25,18	20,48
Lainnya	1,57	1,49	1,30
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Berdasarkan jenis kelamin (Gambar 11), jenis pekerjaan penduduk laki-laki terkonsentrasi pada tenaga usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perburuan (46,08 persen), tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar (26,74 persen), dan tenaga usaha penjualan (12,21

persen). Sedangkan, jenis pekerjaan penduduk perempuan terkonsentrasi pada tenaga usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perburuan (34,15 persen), tenaga usaha penjualan (30,06 persen), dan tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenis (11,84 persen).



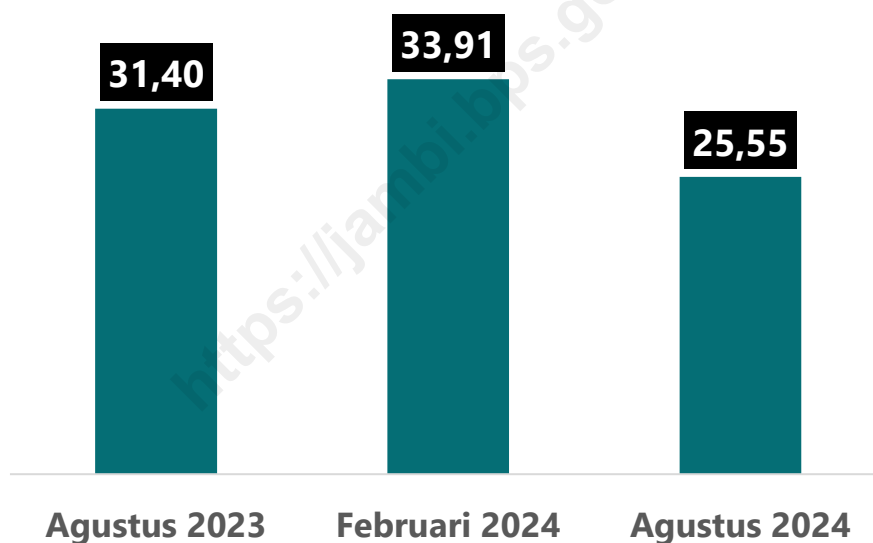
Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

Gambar 11 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, Agustus 2024

KILM 6. Pekerja Paruh Waktu

Pekerja paruh waktu adalah pekerja dengan jumlah jam kerja di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Walaupun jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu, mereka tidak sedang mencari dan mempersiapkan usaha. Selain itu, pekerja paruh waktu juga tidak bersedia jika ada yang menawarkan pekerjaan lain.

Pekerjaan paruh waktu memungkinkan keseimbangan antara waktu bekerja dan waktu untuk keluarga. Pekerjaan ini juga memungkinkan lebih banyak penduduk usia kerja untuk terjun dalam pasar tenaga kerja. Namun, pekerja paruh waktu seringkali mendapatkan upah lebih rendah, prospek karir yang terbatas, dan pekerjaan yang kurang stabil (ILO, 2016).

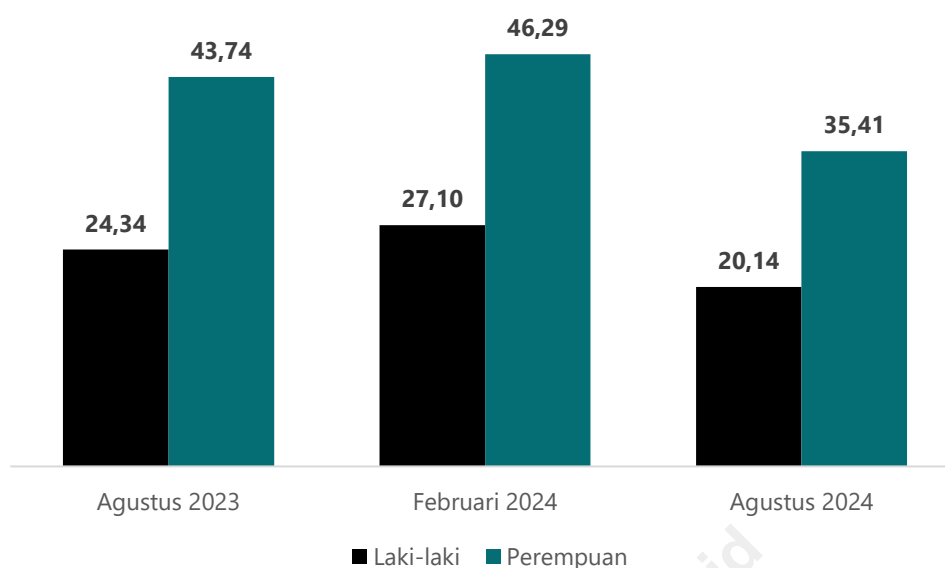


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 12 Tingkat Pekerja Paruh Waktu di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024

Pada Agustus 2024, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 25,55 persen. Dengan kata lain, dari 100 penduduk yang bekerja, terdapat sekitar 26 orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan tidak punya keinginan untuk menambah pekerjaan. Tingkat pekerja paruh waktu pada Agustus 2024 mengalami penurunan

5,85 persen poin dibandingkan Agustus 2023 dan menurun 8,36 persen poin dibandingkan Februari 2024.

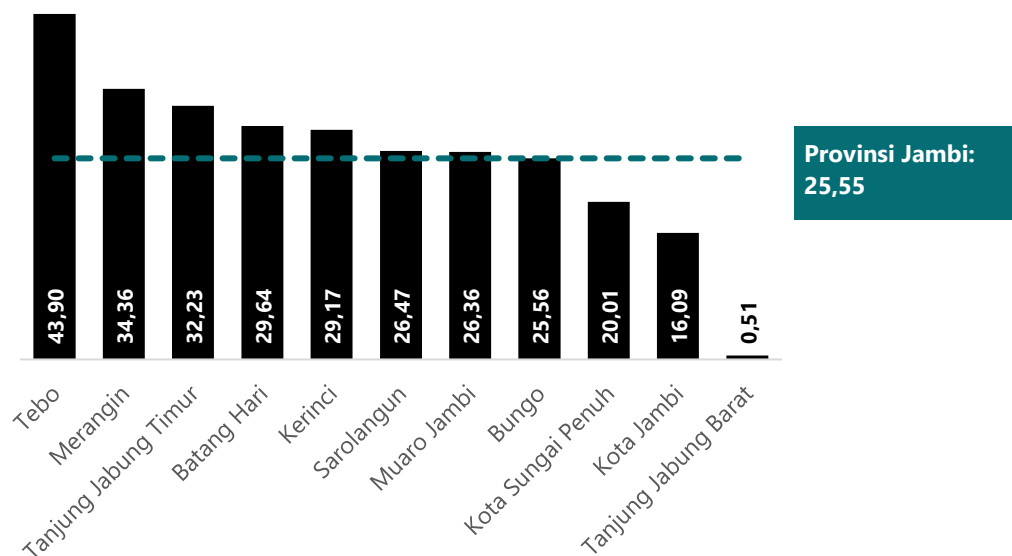


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 13 Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024

Pada Agustus 2024, tingkat pekerja paruh waktu perempuan 1,8 kali lipat tingkat pekerja paruh waktu laki-laki (35,41 persen berbanding 20,14 persen). Perempuan seringkali masih memegang pekerjaan rumah tangga sehingga lebih memilih pekerjaan paruh waktu yang memungkinkan mereka untuk memiliki waktu lebih banyak dengan keluarga.

Tingkat pekerja paruh waktu antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi cukup variatif. Tingkat pekerja paruh waktu terendah terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebesar 0,51 persen. Sedangkan, tingkat pekerja paruh waktu tertinggi terdapat di Kabupaten Tebo, yaitu sebesar 43,90 persen (Gambar 14).

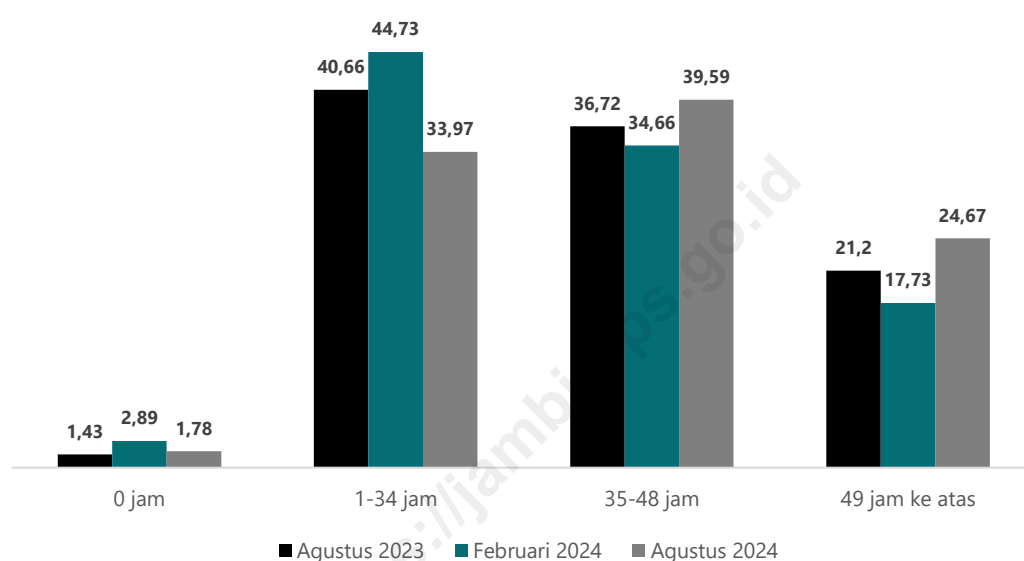


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

Gambar 14 Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), Agustus 2024

KILM 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

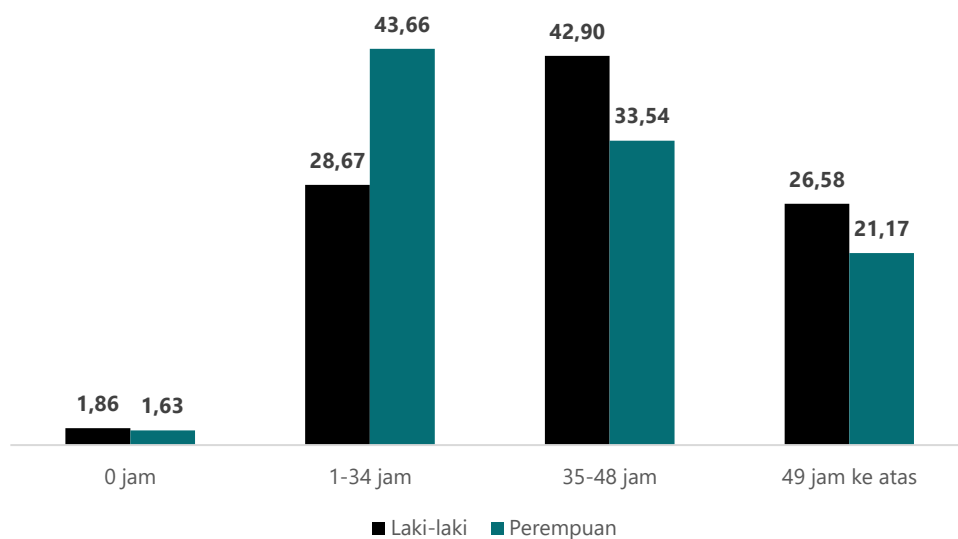
Jam kerja berhubungan secara langsung dengan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Jam kerja yang kurang menunjukkan kemampuan pekerja belum dimanfaatkan secara optimal dan pendapatan yang diterima pekerja tidak maksimal jika ia dibayar berdasarkan lamanya bekerja. Sedangkan, jam kerja yang berlebih dapat mengganggu kehidupan pribadi dan hubungan dengan keluarga (BPS, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 15 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, terlihat bahwa mayoritas penduduk bekerja di Provinsi Jambi memiliki jam kerja normal selama 35–48 jam, yaitu sebesar 39,59 persen. Kemudian penduduk bekerja dengan jam kerja 1–34 jam sebesar 33,97 persen. Sementara itu, penduduk bekerja dengan jam kerja melebihi 48 jam sebesar 24,67 persen. Jam kerja ini melebihi jam kerja normal yang direkomendasikan oleh ILO yaitu maksimal 48 jam seminggu. Jam kerja berlebih dapat berimbas pada penurunan produktivitas pekerja.

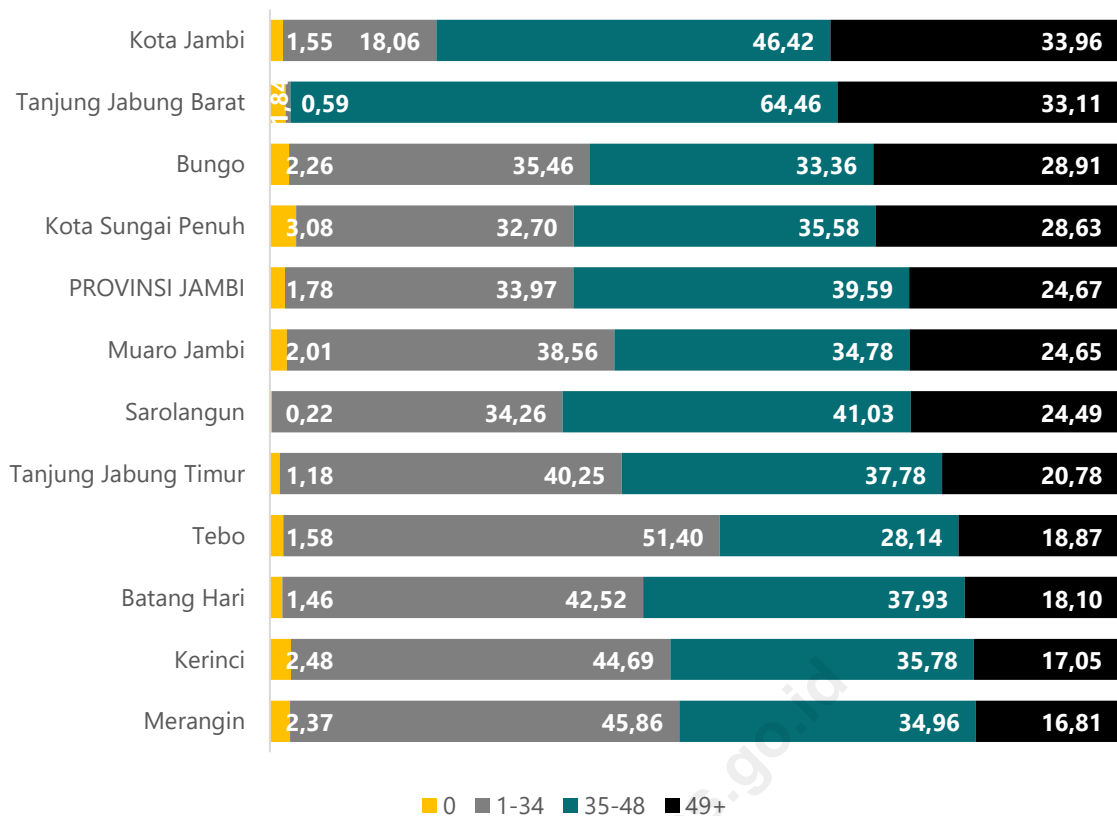


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

Gambar 16 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, Agustus 2024

Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara pola jam kerja laki-laki dan jam kerja perempuan. Mayoritas perempuan bekerja di bawah jam kerja normal (43,66 persen) sedangkan penduduk laki-laki terkonsentrasi pada jam kerja normal (42,90 persen). Perempuan pada umumnya harus membagi waktu antara bekerja dan mengurus rumah tangga, sehingga jam kerja mereka di bawah jam kerja normal.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota (Gambar 17), persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja berlebih tertinggi terdapat di Kota Jambi (33,96 persen), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (33,11 persen), dan Kabupaten Bungo (28,91 persen). Sedangkan, persentase penduduk bekerja dengan jam kerja berlebih terendah terdapat di Kabupaten Merangin (16,81 persen), Kabupaten Kerinci (17,05 persen), dan Kabupaten Batang Hari (18,10 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

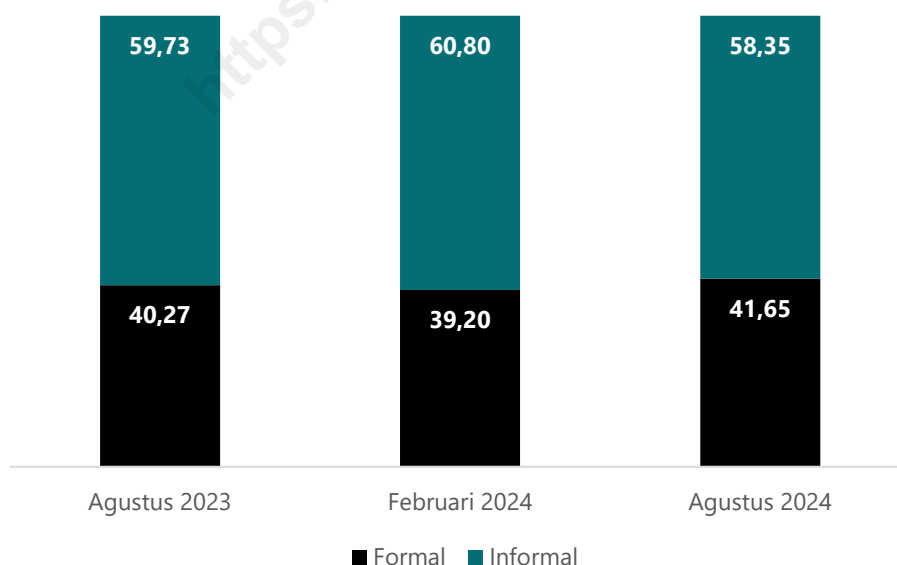
Gambar 17 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Jambi, Agustus 2024

KILM 8. Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, pada umumnya, kondisi pekerjaan sektor informal kurang layak, tidak memiliki sistem jaminan sosial, banyak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan.

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan utama. Penduduk bekerja di kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk penduduk bekerja di kegiatan informal.

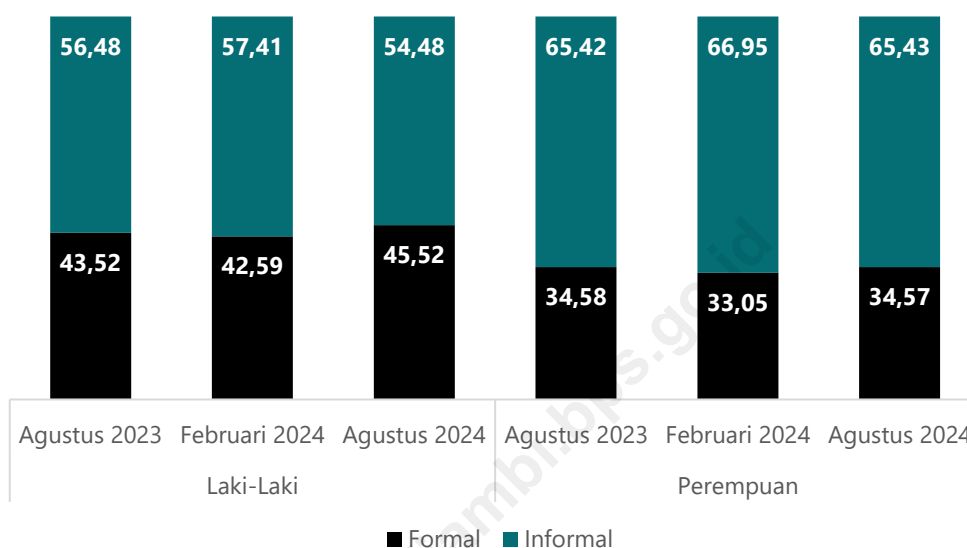
Berdasarkan Sakernas Agustus 2024, sebesar 58,35 persen penduduk bekerja di Provinsi Jambi bekerja pada kegiatan informal. Persentase ini menurun sebesar 1,38 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 18 Persentase Penduduk Bekerja pada Kegiatan Formal/Informal di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

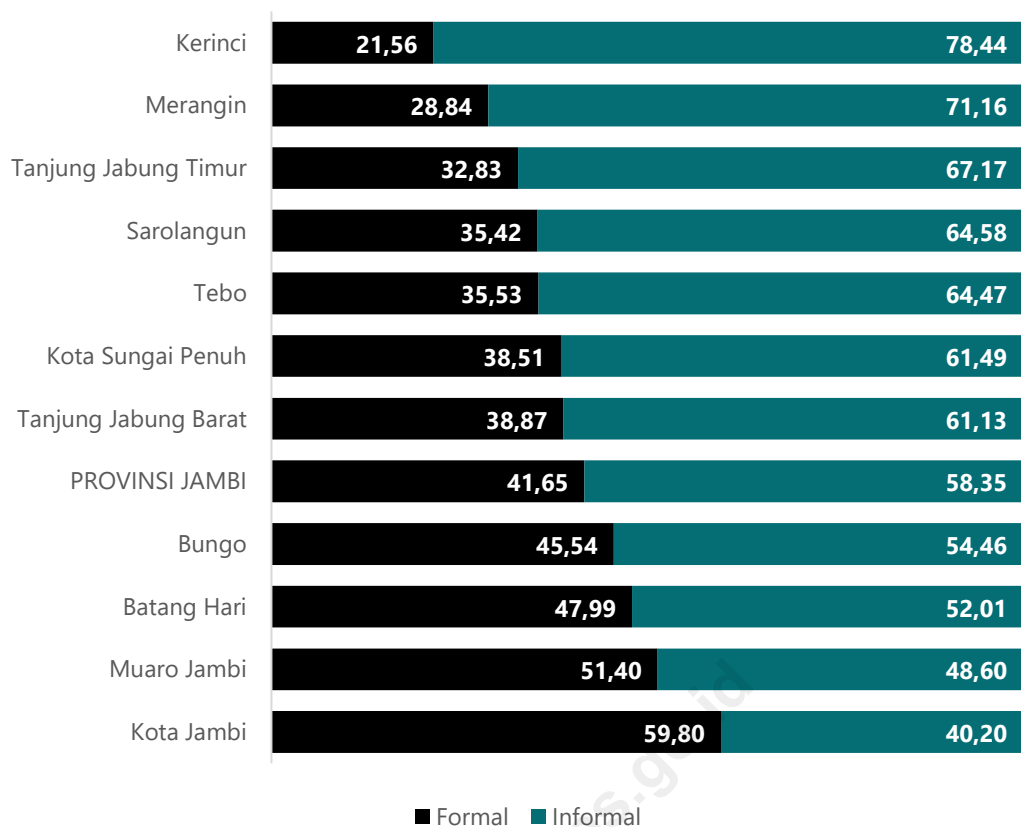
Jika dilihat menurut jenis kelamin (Gambar 19), penduduk perempuan lebih cenderung untuk melakukan kegiatan informal dibandingkan penduduk laki-laki. Sebagai gambaran, pada Agustus 2024, persentase penduduk laki-laki bekerja yang melakukan kegiatan informal mencapai 54,48 persen. Sedangkan, persentase penduduk perempuan bekerja yang melakukan kegiatan informal mencapai 65,43 persen. Penyerapan tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan pada kegiatan informal cenderung fluktuatif selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 19 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota (Gambar 20), persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sangat variatif antar kabupaten/kota. Persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal terendah terdapat di Kota Jambi (40,20 persen), Kabupaten Muaro Jambi (48,60 persen), dan Kabupaten Batang Hari (52,01 persen). Sedangkan persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal tertinggi terdapat di Kabupaten Kerinci (78,44 persen), Kabupaten Merangin (71,16 persen), dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (67,17 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

Gambar 20 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kegiatan Formal/ Informal dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Agustus 2024

3

INDIKATOR PENGANGGURAN

Pada Agustus 2024, **TPT tertinggi** di Provinsi Jambi terdapat pada pendidikan **SMA** (6,80 persen).

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024



BAB 3

INDIKATOR PENGANGGURAN

KILM 9. Pengangguran

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran. Indikator TPT dapat digunakan sebagai acuan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru. Selain itu, indikator ini seringkali menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan selain angka kemiskinan (BPS, 2022).

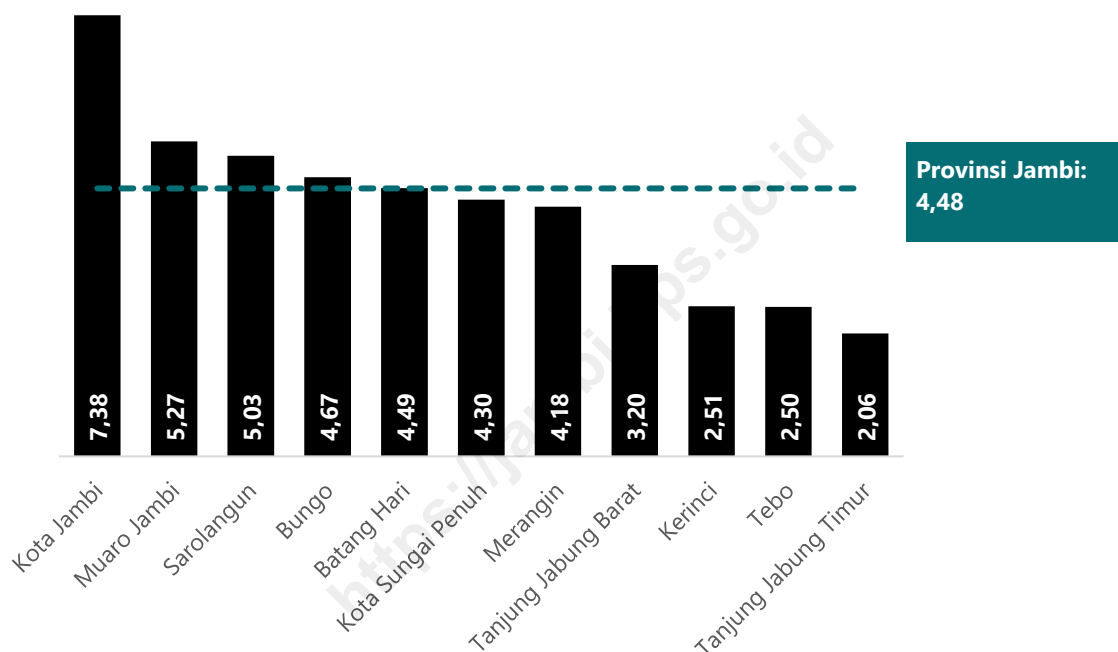
Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2023	2024	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	3,64	4,39	2,68
Perempuan	6,05	4,56	7,62
Total	4,53	4,45	4,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 pada Tabel 4, TPT di Provinsi Jambi mencapai 4,48 persen. Dengan kata lain, dari 100 orang angkatan kerja di Provinsi Jambi, terdapat hampir 5 penduduk yang menganggur. Persentase ini menurun 0,05 persen poin dari Agustus 2023 dan naik 0,03 persen poin dari Februari 2024. Meskipun dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan, TPT yang rendah dapat menyamarkan kemiskinan. Jika suatu daerah tidak memiliki jaring pengaman untuk pengangguran, banyak penduduk akan terpaksa bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, pekerjaan yang mereka dapatkan tergolong tidak layak, misalnya jam kerja kurang, upah rendah, dan produktivitas rendah (ILO, 2016). Sehingga, meskipun TPT sudah termasuk rendah, perlu dilihat kembali lapangan usaha, sektor pekerjaan, upah, dan jam kerja dari penduduk yang bekerja.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki nilai TPT yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebagai gambaran, pada Agustus 2024, TPT perempuan mencapai 7,62 persen, nilai tersebut merupakan 2,8 kali dari nilai TPT laki-laki yang hanya sebesar 2,68 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,96 persen poin, sementara itu TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,57 persen poin. TPT perempuan lebih tinggi dapat disebabkan karena perempuan memiliki kemungkinan lebih besar untuk keluar-masuk pasar tenaga kerja dikarenakan alasan mengurus rumah tangga.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

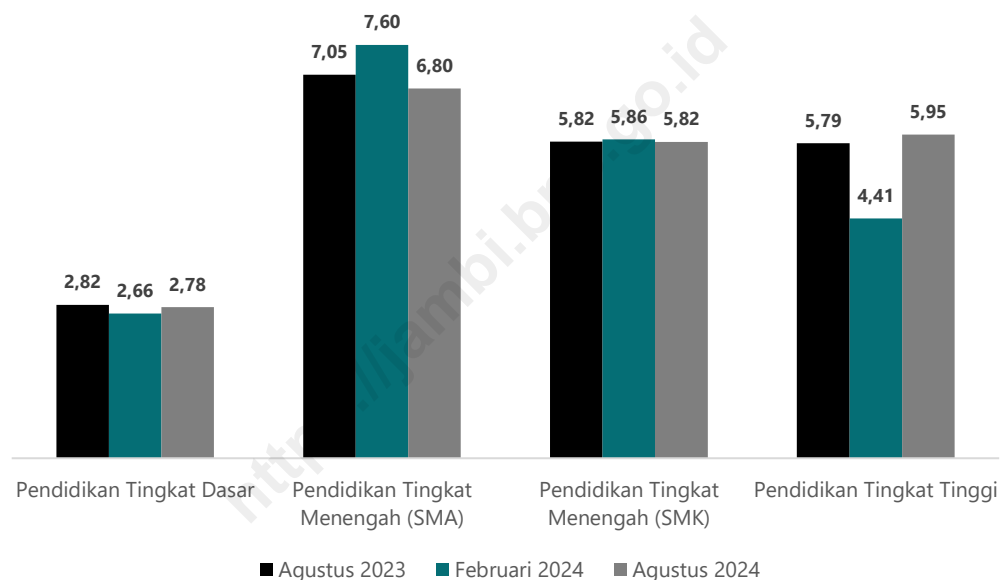
Gambar 21 TPT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), Agustus 2024

Jika ditinjau menurut kabupaten/kota (Gambar 21), kabupaten/kota dengan TPT terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2,06 persen), Kabupaten Tebo (2,50 persen), dan Kabupaten Kerinci (2,51 persen). Sedangkan, kabupaten/kota dengan TPT tertinggi adalah Kota Jambi (7,38 persen). Kabupaten/kota yang memiliki TPT lebih tinggi dari TPT Provinsi Jambi (4,48 persen) adalah Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Batang Hari.

Pengangguran dan Pendidikan

Jika diamati menurut tingkat pendidikan, TPT tertinggi Agustus 2024 terdapat pada pendidikan tingkat menengah (SMA) yaitu sebesar 6,80 persen (Gambar 22). Hal ini mengindikasikan banyak tenaga kerja lulusan SMA yang tidak terserap di pasar tenaga kerja.

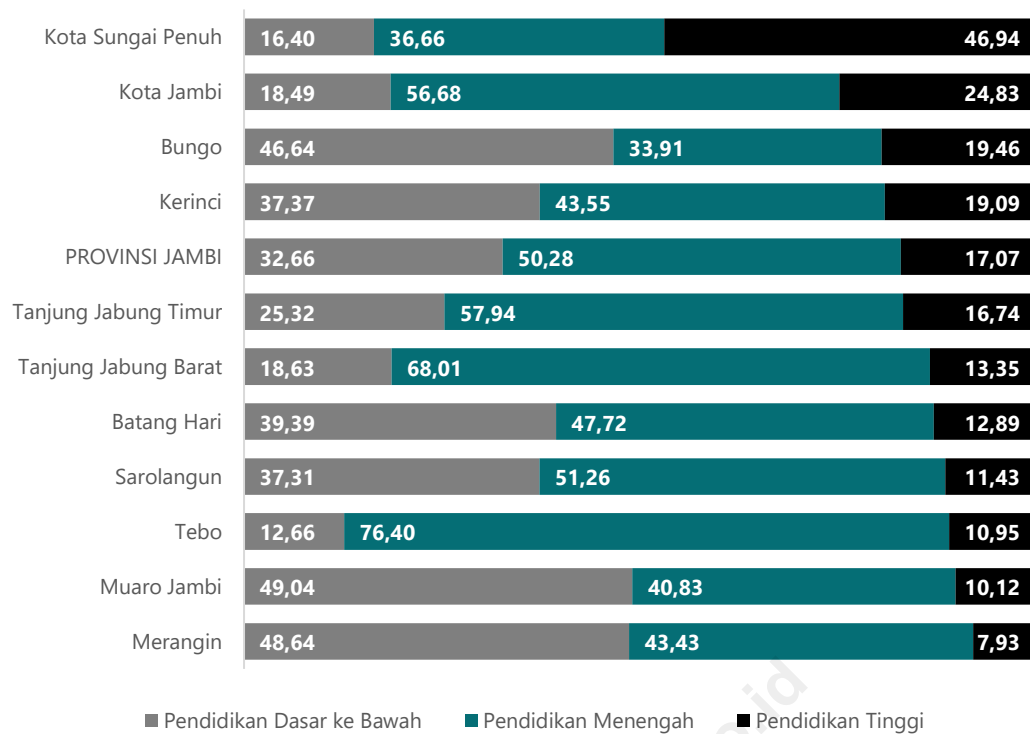
TPT penduduk berpendidikan dasar ke bawah cenderung lebih rendah dibandingkan pendidikan yang lebih tinggi. Mereka yang berpendidikan rendah umumnya berasal dari rumah tangga kurang mampu. Sehingga, besar kemungkinan mereka akan menerima pekerjaan apapun untuk menyambung hidup, meskipun dari segi upah atau jam kerja tergolong kurang layak.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 22 TPT Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024

Apabila ditinjau menurut kabupaten/kota (Gambar 23), pengangguran berpendidikan tinggi terbanyak terdapat di Kota Sungai Penuh (46,94 persen), Kota Jambi (24,83 persen), dan Kabupaten Bungo (19,46 persen). Sedangkan, pengangguran berpendidikan tinggi paling sedikit terdapat di Kabupaten Merangin (7,93 persen).

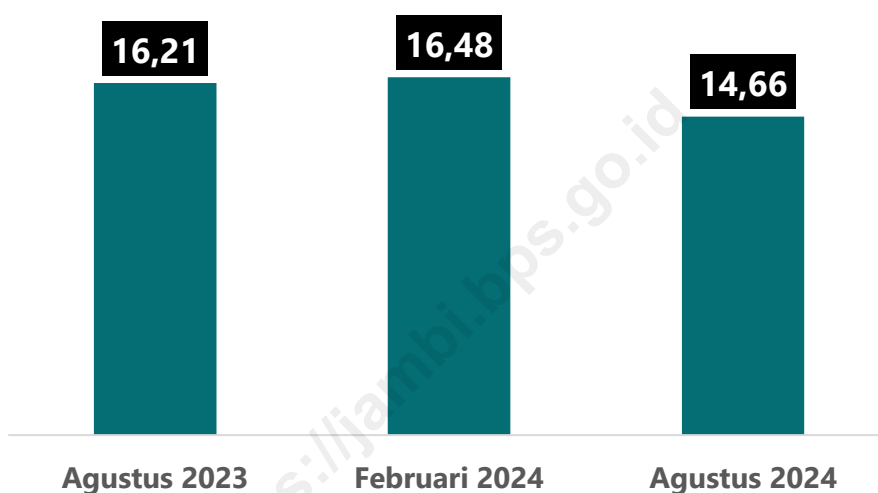


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

Gambar 23 Distribusi Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen), Agustus 2024

KILM 10. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

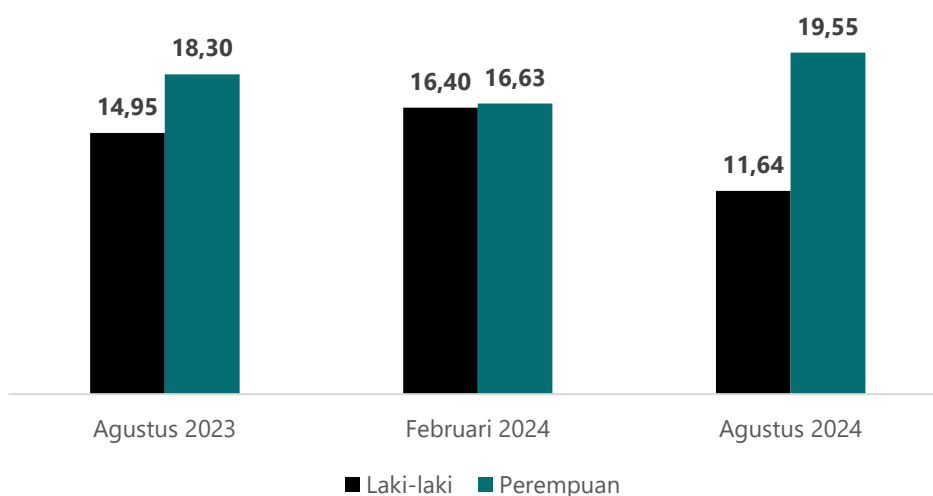
Indikator ini mencerminkan sejauh mana penduduk umur muda bersedia untuk mencari pekerjaan dan/atau mempersiapkan usaha dalam kegiatan ekonomi. Sudah menjadi hal umum bahwa kebanyakan pemuda memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman kerja, sehingga hal ini juga berimbas pada kecilnya kesempatan kerja dan tingginya pengangguran pada kelompok ini. Dalam indikator ini, umur muda mencakup penduduk yang berusia 15 sampai 24 tahun, sedangkan umur dewasa mencakup penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 24 TPT Penduduk Umur Muda di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024

Pada Agustus 2024, TPT kelompok umur muda di Provinsi Jambi mencapai 14,66 persen. Dengan kata lain, dari 100 penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 15 orang yang menganggur. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,55 persen poin dibandingkan Agustus 2023 dan penurunan sebesar 1,82 persen poin dibandingkan Februari 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 25 TPT Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024

Jika diamati menurut jenis kelamin, pada Agustus 2024 TPT penduduk umur muda perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT penduduk umur muda laki-laki. Sebagaimana terlihat pada Gambar 25, pada Agustus 2024, TPT penduduk umur muda perempuan mencapai 19,55 persen, sedangkan TPT penduduk umur muda laki-laki hanya sebesar 11,64 persen. Pola ini mengikuti dengan periode-periode sebelumnya (Agustus 2023–Februari 2024) yang mana TPT penduduk umur muda perempuan juga bernilai lebih besar dibandingkan dengan TPT penduduk umur muda laki-laki. TPT penduduk umur muda perempuan lebih tinggi dapat disebabkan karena perempuan memiliki kemungkinan lebih besar untuk keluar-masuk pasar tenaga kerja dikarenakan alasan mengurus rumah tangga.

Rasio TPT kelompok umur muda terhadap TPT kelompok umur dewasa di Provinsi Jambi Agustus 2024 mencapai 5,45 (Tabel 5). Dengan kata lain, TPT kelompok umur muda enam kali lipat TPT kelompok umur dewasa. Hal ini mengindikasikan permasalahan pengangguran lebih tampak pada kelompok umur muda.

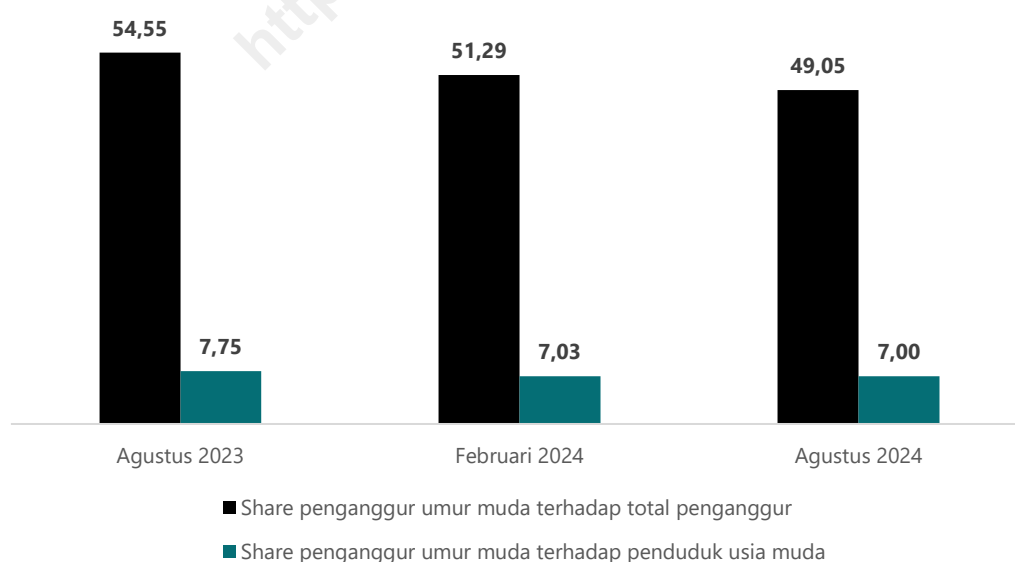
Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023 hingga Agustus 2024, rasio TPT kelompok umur muda terhadap TPT kelompok umur dewasa lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan.

Tabel 5 Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Umur Dewasa di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Rasio TPT Umur Muda Terhadap TPT Umur Dewasa	2023	2024	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	9,13	6,75	10,18
Perempuan	4,82	6,23	3,62
Total	6,67	6,55	5,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024 mencapai 49,05 persen (Gambar 26). Dengan kata lain, sekitar 1 dari 2 penganggur di Provinsi Jambi merupakan penduduk kelompok umur muda. *Share* ini terus menurun selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024. *Share* penganggur umur muda terhadap total penganggur pada Agustus 2024 turun 5,50 persen poin dibandingkan Agustus 2023, dan turun 2,24 persen poin dibandingkan Februari 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 26 Share Penganggur Umur Muda di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024

Di sisi lain, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Agustus 2024 mencapai 7,00 persen. Dengan kata lain, dari 100 penduduk berumur 15–24 tahun terdapat tujuh orang penganggur. *Share* ini turun 0,75 persen poin dibandingkan Agustus 2023, dan turun 0,03 persen poin dibandingkan Februari 2024.

<https://jambi.bps.go.id>

KILM 12. Setengah Pengangguran (*Underemployment*)

Tingkat pengangguran yang rendah tidak selamanya menunjukkan proses penyerapan tenaga kerja yang efektif. Tingkat pengangguran yang rendah dapat menyamarkan fakta bahwa cukup banyak pekerja yang masih bekerja di bawah jam kerja normal, berpenghasilan rendah, dan tidak menggunakan kemampuan mereka secara optimal (ILO, 2016). Indikator setengah pengangguran dapat membantu untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terkait situasi pasar tenaga kerja yang sebenarnya.

Setengah pengangguran dapat didefinisikan sebagai mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

1. Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang; dan
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaan yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

Tabel 6 Penduduk Bekerja yang Termasuk Setengah Pengangguran di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Setengah Pengangguran	2023	2024	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	112.390	147.898	100.937
Perempuan	54.556	43.954	53.528
Total	166.946	191.852	154.465

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Pada Agustus 2024, jumlah penduduk yang termasuk setengah pengangguran di Provinsi Jambi mencapai 154.465 orang, yang terdiri dari 100.937 penduduk laki-laki dan 53.528 penduduk perempuan. Selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024, jumlahnya cenderung fluktuatif. Jika dibandingkan

Agustus 2023, jumlah penduduk tergolong setengah pengangguran di bulan Agustus 2024 turun 12.481 orang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Februari 2024, jumlahnya turun sebanyak 37.387 orang.

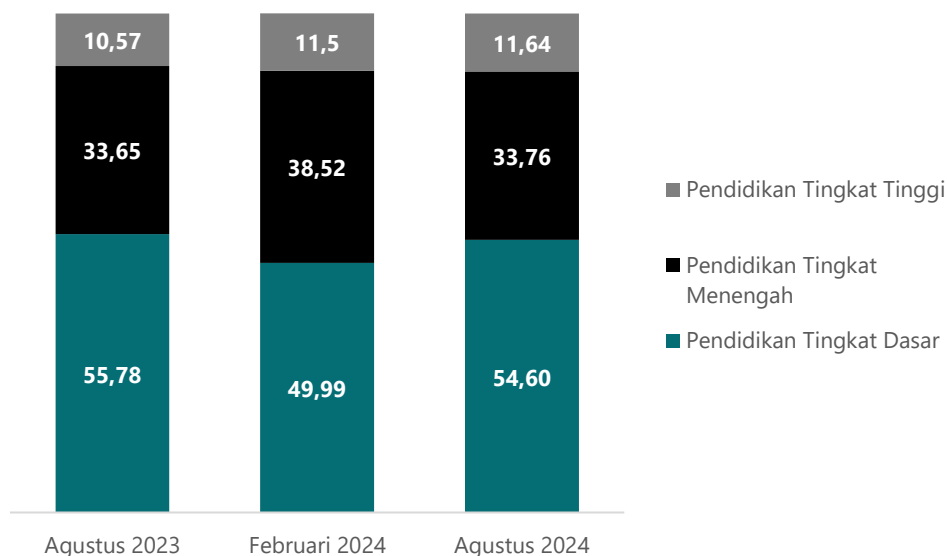
**Tabel 7 Indikator Setengah Pengangguran di Provinsi Jambi (persen),
2023 dan 2024**

Setengah Pengangguran	2023	2024	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Share Setengah Pengangguran Terhadap Total Angkatan Kerja	8,84	10,34	8,05
Laki-Laki	9,44	12,36	8,29
Perempuan	7,82	6,67	7,62
Tingkat Setengah Pengangguran	9,26	10,82	8,43
Laki-Laki	9,80	12,92	8,52
Perempuan	8,32	6,99	8,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Share setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2024 mencapai 8,05 persen, yang berarti dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat sekitar 8 orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan. Tren dari *share* setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024 cenderung fluktuatif (Tabel 7).

Pada Agustus 2024, dari total penduduk bekerja, sekitar 8,43 persen diantaranya merupakan setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran cenderung fluktuatif. Tingkat setengah pengangguran Agustus 2024 turun 0,83 persen poin dibandingkan Agustus 2023 dan turun 2,39 persen poin dibandingkan Februari 2024 (Tabel 7).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 27 Distribusi Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024

Jika dilihat menurut tingkat pendidikan (Gambar 27), penduduk yang tergolong setengah pengangguran di Provinsi Jambi didominasi oleh mereka yang berpendidikan tingkat dasar ke bawah. Pada Agustus 2024, sekitar 1 dari 2 penduduk tergolong setengah pengangguran berpendidikan tingkat dasar ke bawah. Hal ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya di mana rendahnya TPT penduduk berpendidikan tingkat dasar ke bawah barangkali menyamarkan kondisi ketenagakerjaan yang kurang layak. Setelah melengkapi analisis dengan indikator setengah pengangguran, terlihat bahwa penduduk berpendidikan tingkat dasar ke bawah mendominasi setengah pengangguran. Setengah pengangguran rentan untuk memperoleh upah rendah dan tidak dapat menggunakan kemampuan mereka secara optimal.

4

INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA

Pada Agustus 2024, **tingkat ketidakaktifan** di Provinsi Jambi mencapai **31,13 persen**.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024



BAB 4

INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan merupakan persentase penduduk yang termasuk kategori bukan angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Tingkat ketidakaktifan merupakan kebalikan dari TPAK. Sehingga, semakin rendah tingkat ketidakaktifan, semakin tinggi TPAK yang berarti semakin banyak pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Pada Agustus 2024, tingkat ketidakaktifan di Provinsi Jambi mencapai 31,13 persen. Dengan kata lain, dari 100 orang penduduk usia kerja di Provinsi Jambi, sekitar 32 penduduk di antaranya tidak aktif dalam pasar tenaga kerja (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan cenderung stagnan pada kisaran 31 – 33 persen selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024.

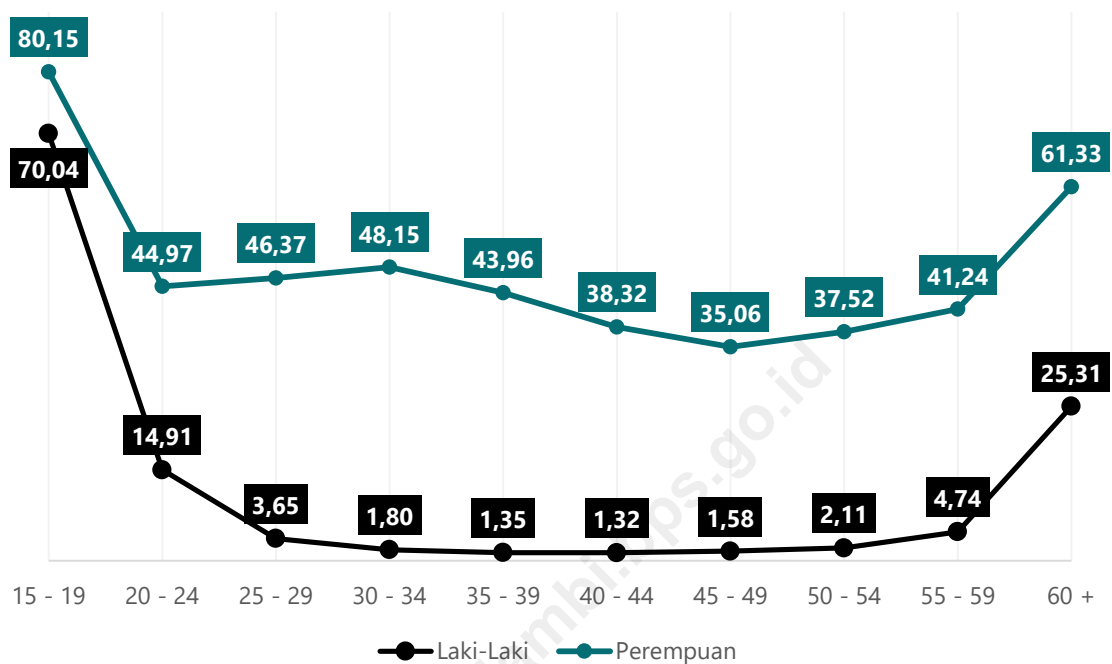
Tabel 8 Tingkat Ketidakaktifan di Provinsi Jambi (persen), 2023 dan 2024

Tingkat Ketidakaktifan	2023	2024	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	14,73	14,84	13,96
Perempuan	48,32	51,57	48,83
Total	31,25	32,91	31,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Jika diamati menurut jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara tingkat ketidakaktifan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tingkat ketidakaktifan perempuan mencapai 3,5 kali lipat tingkat ketidakaktifan laki-laki (48,83 persen berbanding 13,96 persen). Hal ini wajar mengingat besarnya proporsi perempuan yang mengurus rumah tangga.

Berdasarkan kelompok umur, tingkat ketidakaktifan menunjukkan pola seperti huruf “U” (Gambar 28). Tingkat ketidakaktifan tinggi pada penduduk umur muda kemudian menurun perlahan dan mencapai titik terendahnya pada umur 40–44 tahun. Setelah melalui umur tersebut, tingkat ketidakaktifan kembali meningkat seiring dengan peningkatan umur.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

Gambar 28 Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi (persen), Agustus 2024

Kelompok umur 25–54 tahun perlu menjadi perhatian karena pada rentang umur ini diharapkan penduduk sudah terjun ke dalam pasar tenaga kerja mengingat pada usia tersebut umumnya mereka sudah menamatkan pendidikan yang diperlukan untuk bekerja dan belum mencapai usia pensiun (ILO, 2016). Di Provinsi Jambi, tingkat ketidakaktifan penduduk umur 25–34 tidak serendah tingkat ketidakaktifan penduduk umur 35–54. Pola ini terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat disebabkan karena mereka masih menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Pada perempuan, hal ini mungkin disebabkan karena mereka mengurus rumah tangga atau mengasuh anak.

5

INDIKATOR PENDIDIKAN & MELEK HURUF

Persentase angkatan kerja **berpendidikan menengah** di Provinsi Jambi mengalami **peningkatan** pada Agustus 2024.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024



BAB 5

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan untuk menghasilkan *output*. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara. Teori *human capital* menjelaskan bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat antara lain: kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan, dan tambahan pendapatan.

KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja. Kategori tingkat pendidikan yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual disusun berdasarkan tingkat *International Standard Classification of Education* (ISCED) yang disesuaikan dengan variabel yang tersedia di Sakernas. Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) adalah tingkat pendidikan.

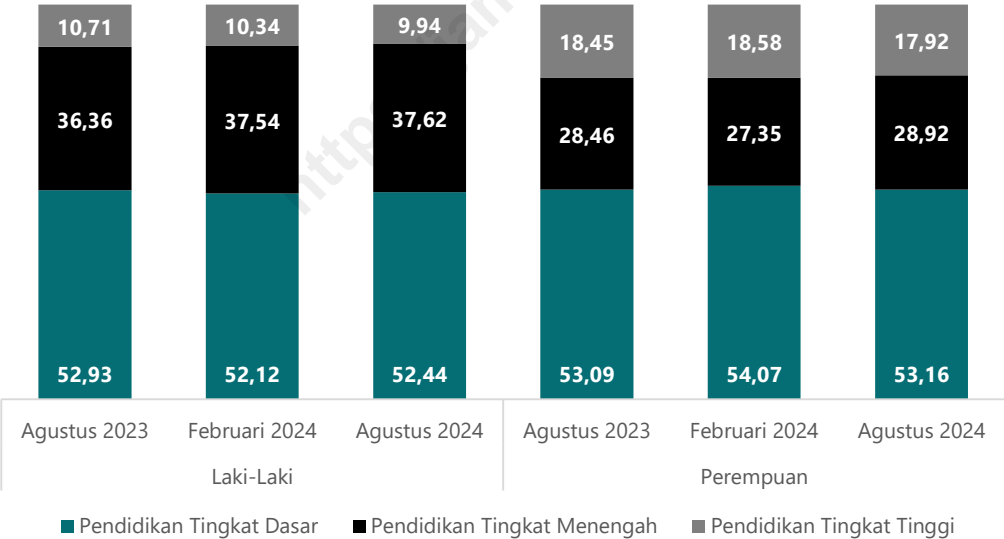
Pada Agustus 2024, komposisi angkatan kerja di Provinsi Jambi didominasi oleh kelompok tingkat pendidikan dasar yang mencapai 52,47 persen, kemudian disusul mereka yang berpendidikan tingkat menengah sebesar 34,43 persen, dan pendidikan tingkat tinggi sebesar 12,86 persen.

Tabel 9 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Tingkat Pendidikan	2023	2024	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	0,00	0,15	0,23
Pendidikan Tingkat Dasar (Tidak tamat SD hingga tamat SMP)	52,99	52,67	52,47
Pendidikan Tingkat Menengah	33,44	33,92	34,43
Pendidikan Tingkat Tinggi	13,57	13,27	12,86
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024, persentase angkatan kerja berpendidikan dasar terus mengalami penurunan, sedangkan persentase angkatan kerja berpendidikan menengah terus menunjukkan peningkatan seiring waktu. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas angkatan kerja di Provinsi Jambi selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024.

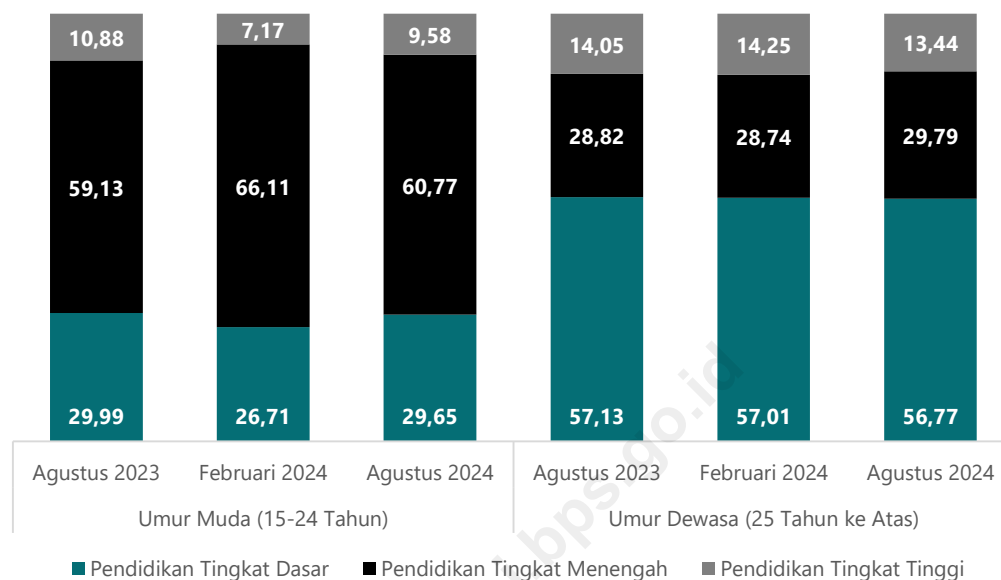


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 29 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Jika diamati menurut jenis kelamin (Gambar 29), distribusi angkatan kerja perempuan yang berpendidikan tinggi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebagai

gambaran, pada Agustus 2024, persentase angkatan kerja perempuan yang berpendidikan tinggi mencapai 17,92 persen sedangkan persentase angkatan kerja laki-laki yang berpendidikan tinggi hanya 9,94 persen. Tren sebaran angkatan kerja menurut tingkat pendidikan baik bagi laki-laki maupun perempuan membentuk pola yang sama pada periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Gambar 30 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur di Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

Jika dilihat menurut kelompok umur (Gambar 30), terdapat pola yang berbeda antara kelompok umur muda dan kelompok umur dewasa. Pada kelompok umur muda, sebagian besar angkatan kerja berpendidikan menengah. Sedangkan, pada kelompok umur dewasa, sebagian besar angkatan kerja berpendidikan dasar ke bawah. Dengan kata lain, terjadi peningkatan kualitas pendidikan generasi muda dibandingkan generasi sebelumnya.

6

INDIKATOR UPAH & BIAYA TENAGA KERJA

Rata-rata **upah/gaji bersih** sebulan buruh/karyawan/pegawai di Provinsi Jambi pada Agustus 2024 mencapai **2,83 juta rupiah**.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024



BAB 6

INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Upah dan Biaya Kompensasi

Besaran upah/pendapatan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja. Akan tetapi, salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan sebulan terakhir pada status pekerjaan tertentu sehingga pada publikasi ini hanya menyajikan rata-rata upah/gaji bersih sebulan terakhir buruh/karyawan/pegawai. Sakernas juga tidak mendata biaya kompensasi sehingga indikator tersebut tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

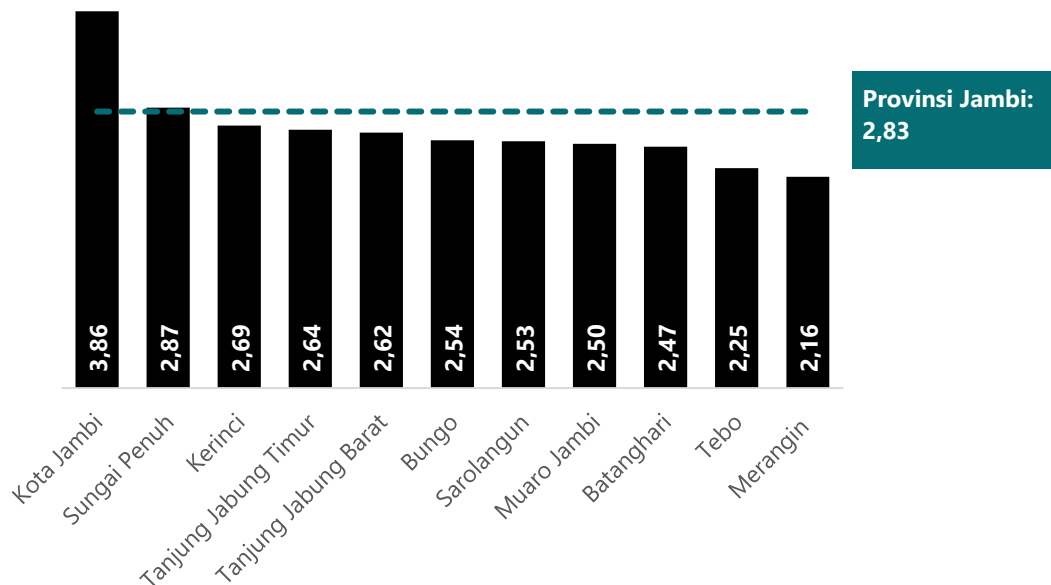
Tabel 10 Rata-Rata Upah/Gaji Selama Sebulan Buruh/Karyawan/ Pegawai di Provinsi Jambi (juta rupiah), 2023 dan 2024

Rata-Rata Upah	2023	2024	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	2,91	2,87	3,06
Perempuan	2,19	2,01	2,34
Total	2,67	2,60	2,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Februari dan Agustus

Rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai di Provinsi Jambi pada Agustus 2024 mencapai 2,83 juta rupiah. Rata-rata upah/gaji ini meningkat dibandingkan Agustus 2023 dan Februari 2024.

Jika ditinjau menurut jenis kelamin, terlihat perbedaan antara upah buruh/karyawan/pegawai berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebagai gambaran, pada Agustus 2024, upah buruh/karyawan/pegawai laki-laki mencapai 3,06 juta rupiah sedangkan upah buruh/karyawan/pegawai perempuan hanya 2,34 juta rupiah (Tabel 10).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2024

Gambar 31 Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (juta rupiah), Agustus 2024

Dari hasil Sakernas Agustus 2024, rata-rata upah/gaji bersih sebulan menurut kabupaten/kota cukup variatif. Rata-rata upah/gaji bersih sebulan terendah terdapat di Kabupaten Merangin (2,16 juta rupiah) sedangkan rata-rata upah/gaji bersih tertinggi terdapat di Kota Jambi (3,86 juta rupiah).

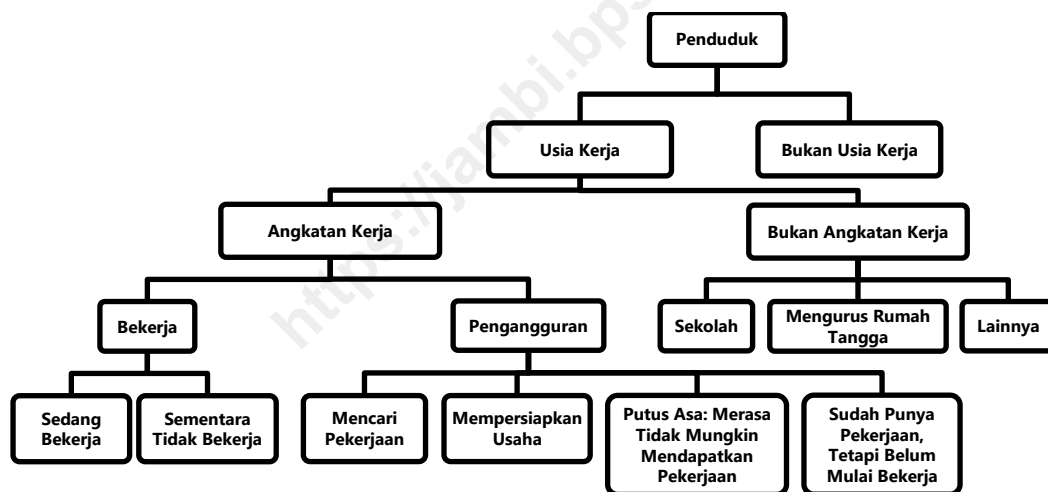
CATATAN TEKNIS



CATATAN TEKNIS

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*–ILO) sebagaimana tercantum dalam buku "*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods*", ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam dalam konsep bekerja.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama satu tahun dan atau mereka yang berdomisili kurang

dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukuran angkatan kerja dan bukan angkatan kerja tersebut didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu terakhir, yaitu tujuh hari sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur atau usia kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja 15 tahun (meskipun dalam survei Sakernas dikumpulkan informasi mulai dari umur 5 tahun). Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasi masing-masing negara. Beberapa negara yang menggunakan batas atas usia kerja, seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Sementara itu, banyak negara seperti Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja, seperti Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun).

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (termasuk yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi atau tidak termasuk angkatan kerja karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, serta kegiatan sosial seperti berorganisasi, dan kerja bakti).

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu terakhir sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya. Konsep bekerja paling sedikit satu jam selama

seminggu terakhir juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan tetap dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan bagi pengusaha. Penghasilan atau keuntungan tersebut dapat berupa uang dan atau barang.

Pengangguran meliputi penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja, atau sudah mempunyai usaha tetapi belum mulai berusaha. Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud berupa 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan, atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tetapi belum mulai berusaha adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja/mempunyai usaha, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja/berusaha.

Periode referensi atau rujukan merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu terakhir paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu terakhir, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam (bekerja paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir). Kriteria satu jam digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan. Definisi penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), jika batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total. Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir" untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently*

economically active population), tanpa melihat lapangan pekerjaan, jabatan, maupun status pekerjaannya.

Indikator Pasar Tenaga Kerja

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*-ILO) meluncurkan *Key Indicator of Labour Market* (KILM) edisi ke-9 pada tahun 2015, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 17 (tujuh belas) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama), KILM 5 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama), KILM 6 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 7 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja), dan KILM 8 (Penduduk yang Bekerja di Kegiatan Informal);
3. Indikator pengangguran dan Setengah Pengangguran (*underemployment*), yang terdiri dari KILM 9 (Pengangguran), KILM 10 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 11 (Pengangguran Jangka Panjang); KILM 12 (Setengah Pengangguran/*underemployment*).
4. Indikator bukan angkatan kerja (ketidakaktifan), yang terdiri dari KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
5. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
6. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Upah dan Biaya Kompensasi);

7. Produktivitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 16 (Produktivitas Tenaga Kerja);
8. Indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 17 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15 tahun ke atas, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan pada lebih dari 190 negara sejak tahun 1980.

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja.

Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, Setengah Pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan agar indikator ini ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian; dan
7. Pekerja keluarga/tak dibayar

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

1. Buruh/karyawan/pegawai;
2. Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari:
 - a. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
 - c. Berusaha sendiri;
3. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
4. Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa. Dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi lapangan pekerjaan disajikan dalam 17 kategori yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Tujuh belas (17) kategori yang dimaksud adalah:

- A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- B. Pertambangan dan penggalian;
- C. Industri pengolahan;
- D. Pengadaan listrik dan gas uap/air panas dan udara dingin;
- E. *Treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
- H. Pengangkutan dan pergudangan;
- I. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
- J. Informasi dan komunikasi;
- K. Aktivitas keuangan dan asuransi;
- L. Real estat;
- M,N. Jasa perusahaan;
- O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- P. Pendidikan;
- Q. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
- R,S,T,U. Jasa lainnya

KILM 5. Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Klasifikasi jenis pekerjaan menggunakan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu kepada ISCO 2008 dengan uraian jenis pekerjaan lebih rinci. Dalam penyajian publikasi ini klasifikasi tersebut dikonversikan ke Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) 1982. Dengan kategori sebagai berikut:

- 0/1. Tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenis;

1. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan;
2. Tenaga tata usaha dan yang sejenis;
3. Tenaga usaha penjualan;
4. Tenaga usaha jasa;
5. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 7/8/9. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar;
- X/00. Lainnya

KILM 6. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika, dan El Salvador¹⁾. Untuk kasus Indonesia, definisi yang digunakan adalah orang yang

¹⁾ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja per minggu (jam kerja biasanya atau jam kerja aktual/sebenarnya): 0 jam, 1–34 jam, 35–48 jam, dan 49 jam ke atas.

KILM 8. Penduduk yang Bekerja di Kegiatan Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau tidak diberikan izin sakit, dan sebagainya)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk berbagai tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal. Pekerjaan upahan informal mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Sedangkan yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada

usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar, dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Perbedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, dan anggota koperasi produksi.

BPS belum dapat menyajikan secara resmi untuk data pekerja informal yang mengacu pada ICLS ke-17 karena belum diputuskan rilis data secara resmi hingga saat ini. Pada publikasi ini, BPS menentukan penduduk yang bekerja pada kegiatan formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sementara status pekerjaan lainnya termasuk penduduk bekerja pada kegiatan informal.

KILM 9. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru dan bersedia untuk bekerja. Konsep ini tidak dapat diartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun sering terdapat korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan dan cenderung memiliki korelasi negatif²⁾. Definisi baku untuk adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/mempersiapkan usaha baru, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang:

²⁾ Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

1. Tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
2. Tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha baru;
3. Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa); atau
4. Sudah punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai usaha, tetapi belum mulai bekerja/berusaha.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, dan tidak harus selalu ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa

denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah angkatan kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadangkadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 10. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru, dan (c) bersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 11. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Informasi ini dikumpulkan hanya untuk tipe pengangguran yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha sehingga tidak lengkap untuk seluruh kategori pengangguran. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM12. Setengah Pengangguran (*Underemployment*)

Penduduk yang dikategorikan dalam Setengah Pengangguran adalah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dengan kondisi:

1. Secara sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Penduduk yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Penduduk yang menginginkan untuk mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Bersedia menerima pekerjaan tambahan/lain.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (termasuk kategori bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK—lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurangi dengan TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar tenaga kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana peran ibu yang bekerja dikaitkan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya

memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori pendidikan yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pada Sakernas pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* yang telah disesuaikan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak pernah bersekolah adalah penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
2. Pendidikan tingkat dasar, yaitu penduduk yang tidak/belum tamat SD dan mereka yang berpendidikan tamat SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
3. Pendidikan tingkat menengah, yaitu penduduk dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;

4. Pendidikan tingkat tinggi, yaitu penduduk yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/S1, dan S2/S3.

Di samping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun³⁾), dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 15. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja

Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah. Indikator yang disajikan hasil Sakernas pada publikasi ini adalah rata-rata upah/pendapatan sebulan terakhir bagi buruh/karyawan/pegawai. Biaya kompensasi tidak dapat disajikan pada publikasi ini karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas.

KILM 16. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi Tenaga Kerja/*Labour* berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

³⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

KILM 17. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator produktivitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis indikator ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

<https://jambi.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2023. *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Jambi Agustus 2022*. Jambi: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2024. *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Jambi Agustus 2023*. Jambi: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Indikator Pasar Tenaga Kerja Agustus 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Buku Pedoman Pencacahan Sakernas Agustus 2024*. Jakarta: BPS.
- Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. 1990. *Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods*. Geneva: International Labour Office.
- ILO. (2016). *Key Indicators of The Labour Market (Ninth Edition)*. Geneva: ILO.
- Maligalig, Dalisay S., Sining Cuevas, and Aleli Rosalio. 2008. Informal Employment in Bangladesh. Dokumen dibuat untuk ADB.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No. 4, Telanaipura, Jambi 36122

Telp. 0741-60497 Homepage: <http://jambi.bps.go.id>

E-mail: bps1500@bps.go.id